KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI ARMADA

TRIWULAN III TAHUN 2024

DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI ARMADA
DIREKTORAT JENDERAL PSDKP

Kata Pengantar

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengendalian Operasi Armada Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pencapaian Kinerja Direktorat Pengendalian Operasi Armada Tahun 2024.

LKj berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif, alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja setiap unit oganisasi di lingkungan Direktorat Pengendalian Operasi Armada. Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Direktorat Pengendalian Operasi Armada telah menerapkan metode kombinasi Balanced Scorecard (BSC) dan Kerangka Logis (Logical Frame Work) sebagai alat manajemen kinerja. Melalui implementasi BSC, pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Pengendalian Operasi Armada diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Kontrak Kinerja Direktorat Pengendalian Operasi Armada pada TW III Tahun 2024.

Pencapaian IKU Direktorat Pengendalian Operasi Armada TW III Tahun 2024 telah diupayakan melalui pelaksanaan progam Pemantauan dan Operasi Armada dengan 5 (lima) output/kegiatan utama, yaitu : (1) Pengembangan Infrastruktur Pengawasan SDKP; (2) Operasional Pusat Pengendalian; (3) Penyediaan Logistik dan Pengawakan Kapal Pengawas; (4) Operasional Armada dan; (5) Perawatan Kapal Pengawas. Sampai dengan TW III Tahun 2024 Direktorat Pengendalian Operasi Armada telah berhasil mencapai beberapa kinerja strategis yang menjadi target pencapaian khususnya yang menunjang pencapaian kinerja level Eselon I dan Menteri, serta tentunya kegiatan yang menjadi perhatian.

Akhir kata, semoga LKj ini dapat bermanfaat untuk perbaikan birokrasi dan sebagai bentuk pertanggung jawaban akuntabilitas Direktorat Pengendalian Operasi Armada pada periode Triwaulan III Tahun 2024. Keberadaan laporan ini tidak hanya

untuk memenuhi kewajiban namun sebagai upaya perbaikan terus menerus di Direktorat Pengendalian Operasi Armada dengan melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja untuk triwulan berikutnya dan dimasa mendatang agar menjadi lebih baik.

Jakarta, 10 Oktober 2024
Plt. Direktur Pengendalian Operasi Armada

Saiful Umum

Tim Penyusun

Penanggungjawab

Direktur Pengendalian Operasi Armada

Koordinator Pelaporan Direktorat POA

1. Ema Velayati, S.St.Pi
2. Ikrom Bungsu, S.Pi
3. Vandra Anggriawan, SH
4. Hamzah Abdulloh, A.Md

Kontributor Pelaporan Direktorat POA

1. Arseto Rahadyawan, ST
2. Edwin Haryanto, S.Tr.Pi
3. Bilmantasya Al Fattha, ST
4. Nova Roy Yohana, S.Sos
5. Noval Reza Jaya, A.Md
6. Husain, S.Kom

Daftar Isi

Kata Pengantar 2
Tim Penyusun 4
Daftar Isi 5
Daftar Tabel 6
Daftar Gambar 7
Daftar Lampiran 8
Ringkasan Eksekutif 9
BAB I 13
Pendahuluan 13
Latar Belakang 14
Maksud dan Tujuan 15
Isu Strategis Tahun 2024 16
Tugas dan Fungsi Direktorat POA 17
Sistematika Penyajian 19
BAB II 20
Perencanaan Kinerja 20
RENSTRA DITJEN PSDKP TAHUN 2020-2024 21
Perjanjian Kinerja Dit. POA 24
ALOKASI ANGGARAN 27
BAB III 28
Akuntabilitas Kinerja 28
Pengukuran Capaian Kinerja 29
Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja 31
Realisasi Anggaran 74
BAB IV 77
Penutup 77
A. Kesimpulan 78
B. Rekomendasi 78
LAMPIRAN 79

Daftar Tabel

Tabel 1.Target dan realisasi capaian kinerja Dit. POA TW III 2024 10
Tabel 2. Target dan Realisasi IKU-1 TW III Tahun 2024 33
Tabel 3. Target dan Realisasi IKU-2 TW III Tahun 2024 34
Tabel 4. Komponen Perhitungan IKU 2 35
Tabel 5. Rincian analisis pelanggaran periode Januari sd Juni 2024 35
Tabel 6. Pemantauan Kapal di Kawasan Konservasi Januari-September 2024 36
Tabel 7. Daftar Keaktifan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Juni 2024 39
Tabel 8.. Target dan Realisasi IKU 3 Periode TW III Tahun 2024 40
Tabel 9. Target dan Realisasi IKU 4 Periode TW III Tahun 2024 42
Tabel 10. Target dan Realisasi IKU 5 Periode TW III Tahun 2024 43
Tabel 11. Rincian capaian IKU 6 Direktorat POA TW III Tahun 2024 46
Tabel 12. Hasil Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Ditjen PSDKP sampai dengan TW III Tahun 2024 47
Tabel 13. Target dan Realisasi IKU 7 Periode TW III Tahun 2024 48
Tabel 14. Target dan Realisasi IKU 7 Periode TW III Tahun 2024 48
Tabel 15. Target dan Realisasi IKU 8 Periode TW III Tahun 2024 50
Tabel 16. Target dan Realisasi IKU 9 Periode TW III Tahun 2024 51
Tabel 17. Target dan Realisasi IKU 10 Periode TW III Tahun 2024 52
Tabel 18. Target dan Realisasi IKU 11 Periode TW III Tahun 2024 53
Tabel 19. Hasil Penilaian (Survey) BKI Pada Tahun 2024 54
Tabel 20. Target dan realisasi IKU-12 periode TW III Tahun 2024 55
Tabel 21. Rincian Nilai Supervisi Pembangunan Prasarana di UPT 56
Tabel 22. Target dan realisasi IKU-13 periode TW III Tahun 2024 57
Tabel 23. Target dan realisasi IKU 14 periode Tahun 2024 58
Tabel 24. Target dan realisasi IKU-15 periode TW III Tahun 2024 59
Tabel 25. Target dan Realisasi IKU 16 Periode TW III Tahun 2024 61
Tabel 26. Target dan Realisasi IKU-17 Periode TW III Tahun 2024 62
Tabel 27. Target dan realisasi IKU 18 periode TW III Tahun 2024 63
Tabel 28. Target dan realisasi IKU 19 periode TW III Tahun 2024 64
Tabel 29. Rincian target dan realisasi IKU-20 periode TW III Tahun 2023 65
Tabel 30. Target dan realisasi IKU 21 periode TW III Tahun 2024 67
Tabel 31. Target dan realisasi IKU 22 periode TW III Tahun 2024 68
Tabel 32. Target dan realisasi IKU 23 periode TW III Tahun 2024 70
Tabel 33. Target dan realisasi IKU-24 periode TW III Tahun 2024 71
Tabel 34. Target dan realisasi IKU-24 periode TW III Tahun 2024 72
Tabel 35. Target dan realisasi IKU-26 periode TW III Tahun 2024 73
Tabel 36. Rekap Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA TW III Tahun 2024 74

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat POA 17
Gambar 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 24
Gambar 3 Tangkapan Layar Capaian Kinerja Direktorat POA Tahun 2024 29
Gambar 4. Komponen nilai supervisi pembinaan Pokmaswas 32
Gambar 5 Tangkapan Layar Aplikasi Si Susan 41
Gambar 6 Ilustrasi Operasi Pesawat Patroli 44
Gambar 7 Kegiatan Menghentikan, Memeriksa dan Menahan (henrikhan) oleh Kapal Pengawas . 47
Gambar 8. Pengisian Bahan Bakar Minyak KP Hiu Macan Tutul 02 49

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....80
Lampiran 2 Rincian Hasil Operasi Pesawat Patroli.....83
Lampiran 3 Daftar kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas..88

Ringkasan Eksekutif

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA) telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) periode Triwulan III Tahun 2024. Laporan Kinerja tersebut merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Direktorat POA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Peta Strategis Direktorat POA tahun 2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) tahun 2020-2024.

Sejalan dengan upaya pencapaian Visi dan Misi dimaksud. Direktorat POA telah menetapkan 5 Sasaran Kegiatan dan 26 Indikator Kinerja (IK). Capaian kinerja Direktorat POA untuk TW III Tahun 2024 mencapai 114,77% mengalami kenaikan sebesar 3.91% dari capaian TW III tahun 2023 sebesar 110,86%. Dalam hal pelaksanaan anggaran, Direktorat POA telah melaksanakan 9 Rincian Output (RO) yang tertuang dalam RKA-K/L Satker Sekretariat Ditjen PSDKP tahun 2024. Dengan Pagu Direktorat POA sebesar Rp 445,134,101,000 (empat ratus empat puluh lima miliar seratus tiga puluh empat juta seratus satu ribu rupiah).

Realisasi anggaran Direktorat POA TW III Tahun 2024 sebesar Rp305,899,404,402 (tiga ratus lima miliar delapan ratus sembilan puluh sembialan juga empat ratus empat ribu empat ratus dua rupiah) atau sebesar 82% dari Pagu anggaran.

Dalam merealisasikan anggaran, Direktorat POA mengacu pada prinsip *budget follow program* secara efektif dan efisien. Artinya, setiap anggaran yang dikeluarkan harus mendukung pencapaian indikator kinerja lingkup Direktorat POA. Adapun dalam meningkatkan pencapaian kinerja organisasi serta memastikan setiap indikator kinerja tercapai sesuai target yang ditetapkan, Direktorat Pengendalian Operasi Armada senantiasa melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin sehingga berbagai kendala dalam pencapaian kinerja dan tindaklanjutnya dapat diantisipasi dan disiapkan mitigasinya.

Realisasi pencapaian indikator kinerja Direktorat POA periode TW III Tahun 2024, ditabulasikan pada Tabel 1 berikut:

*Tabel 1.*Target dan realisasi capaian kinerja Dit. POA TW III 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI	%
1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas	-	-	-
2	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat	2	Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP	60	75	125.00%
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	81	94.15	116.23%
		4	Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek Bidang Pemantauan SDKP	-	-	-
3	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	5	Indeks kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	93	97,94	105.31%
		6	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	70	95.12	135.89%
		7	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas	100	100	100.0%
		8	Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas	-	-	-
		9	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Operasi Armada Pengawasan SDKP	-	-	-
4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan	10	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan	-	-	-

	sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketetuan	11	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP	-	-	-
		12	Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP	-	-	-
		13	Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP	40	62.31	155.78%
		14	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	-	-	-
		15	Inovasi yang dihasilkan Bidang Pemantauan dan Operasi Armada	-	-	-
5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA	100	100	100%
		17	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA	-	-	-
		18	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat POA	-	-	-
		19	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	80	100	125%

	20	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	-	-	-
	21	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat POA	-	-	-
	22	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA	94	133.33	141.84%
	23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA	-	-	-
	24	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA	-	-	-
	25	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat POA	-	-	-
	26	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP	-	-	-

Nilai Capaian Kinerja Direktorat POA	114.77

BAB I
Pendahuluan

Latar Belakang

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam Pembangunan kelautan dan perikanan. Peran pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang kelautan dan perikanan. Pilar pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan semakin kuat, saat ini kewenangan yang dimiliki yaitu pemantauan dan pengawasan, penegakan hukum dan pemberian sanksi administrasi dibidang kelautan dan perikanan.

Salah satu kunci keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tersebut yaitu memerlukan peran dan kinerja dari unit kerja yaitu Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA). Ruang lingkup tugas dari Direktorat POA meliputi penyediaan sarana dan prasarana pengawasan, penyiapan logistik dan operasi kapal pengawas, pengoperasian kapal pengawas dan pesawat patroli, pemantauan dan penyelenggaraan pusat pengendalian serta pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas. Ukuran kinerja tersebut dengan jelas ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat POA.

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Direktorat POA yang handal, profesional, akuntabel , efektif dan efisien, diperlukan manajemen kinerja yang meliputi: aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Direktorat Pengendalian Operasi Armada sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara Negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Direktorat POA telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang menginformasikan capaian kinerja selama TW III Tahun 2024. Keberadaan laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk memberikan umpan balik perbaikan dan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Direktorat POA TW III Tahun 2024 disusun dengan tujuan yaitu:

1. Penyampaian pertanggungjawaban kinerja Direktorat POA kepada seluruh stakeholder dan masyarakat kelautan dan perikanan.

2. Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Direktorat POA sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Isu Strategis Tahun 2024

Isu strategis yang menjadi tantangan Direktorat POA dalam pemantauan, pengendalian dan operasi armada, antara lain:

1. Praktik *IUU fishing* yang masih marak terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan tidak sesuai ketentuan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII). Praktik penangkapan ikan ilegal seringkali diikuti dengan aktifitas perbudakan *(slavery)* dan perdagangan orang *(people smuggling)* diperlukan koordinasi dan sinergitas dari semua pihak, antara lain: TNI-Angkatan Laut, POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan-Ditjen Hubla, Kementerian Kelautan dan Perikanan-Ditjen PSDKP, Kementerian Keuangan-Ditjen Bea Cukai, Badan Keamanan Laut (Bakamla)
2. Pemeriksaan terhadap pemanfaatan ruang laut, kawasan konservasi, pesisir pulau-pulau kecil, pengambilan pasir laut ilegal, dan pencemaran belum optimal dilakukan oleh kapal pengawas.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan baik berupa armada operasi (kapal pengawas dan speedboat) maupun prasarana perkantoran dan fasilitas penunjang operasi pengawasan sdkp lainnya yang masih jauh dari kondisi ideal. Modernisasi armada pengawasan juga menjadi kebutuhan, saat ini armada kapal pengawas 60% sudah berumur diatas 10 tahun dengan daya jelajah yang terbatas dan kemampuan serta kehandalan dalam melakukan pengawasan di laut juga sangat terbatas sehingga perlu untuk melakukan peremajaan kapal pengawas yang baru dan lebih modern
4. Perkembangan harga BBM dunia terus mengalami kenaikan, kondisi ini mengakibatkan hari operasi kapal pengawas terkoreksi dan menjadi berkurang dari yang direncanakan sehingga dengan kemampuan frekuensi operasi kapal pengawas tersebut maka pengawasan dilaut perlu diintegrasikan dengan VMS atau dengan operasi udara.

.

Tugas dan Fungsi Direktorat POA

Tugas Direktorat Pengendalian Operasi Armada berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 5/PERMEN- KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan prasarana, sarana, dan pengendalian armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Direktorat POA dipimpin oleh seorang Direktur dengan dibantu oleh 6 (enam) Ketua Tim Kerja yaitu: (1) Tim Kerja Prasarana dan Sarana, (2) Tim Kerja Pengendalian Sistem Informasi dan Intelijen, (3) Pengawakan dan Logistik, (4) Pengoperasian Kapal Pengawas dan Pesawat Patroli (5) Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas, (6) Dukungan Manajerial. Struktur Organisasi sebagaimana Gambar 1.

Gambar 1 *Struktur Organisasi Direktorat POA*

Adapun Direktorat Pengendalian Operasi Armada memiliki beberapa fungsi sebagai berikut

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, perencanaan, pengendalian penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, pengendalian, dan operasi armada

pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen, pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana, dan pengendalian armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas;

2. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, perencanaan, pengendalian penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, pengendalian, dan operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen, pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana, dan pengendalian armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas;
3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, perencanaan, pengendalian penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, pengendalian, dan operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen, pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana, dan pengendalian armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi, perencanaan, pengendalian penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, pengendalian, dan operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen, pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana, dan pengendalian armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas; dan
5. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengendalian Operasi Armada.

Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Direktorat POA secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Direktorat POA, Ditjen. PSDKP tahun 2024 serta sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja
Menguraikan rencana strategis Ditjen. PSDKP untuk periode 2020- 2024 dan perjanjian kinerja Direktorat POA tahun 2024.

Bab IV Akuntabilitas Kinerja
Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan selama tahun 2024.

Bab IV Penutup
Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Direktorat POA, Ditjen. PSDKP periode Tahun 2024 dan merekomendasikan perbaikan kinerja di masa mendatang

BAB II
Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024.

Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan bottom up dan top down dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Koordinator dan Sub Koordinator lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan top down mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan bottom up dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

- Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
- Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
- Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
- Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP

Berdasarkan arah kebijakan Pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:

- Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP
- Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP
- Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP
- Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP

2. Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
   - Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, speed boat dan sarana pengawasan lainnya)
   - Membangun infrastruktur pengawasan yang memadai
   - Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional
   - Mengembangkan kelembagaan pengawasan
3. Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
   - Operasi bersama pengawasan di laut Pertukaran data
   - Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan
   - Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan
4. Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
   - Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat
   - Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan IUU fishing
   - Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (preventif), pembinaan, represif (ultimum remedium).
   - Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan
5. Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
   - Meningkatkan kesadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab
   - Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain

- Optimalisasi peranserta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS
- Menanamkan pengetahuan pengelolaanSDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar” Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”
- Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar
- Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP

Dalam mewujudkan manajamen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil pada tahun 2024, dilbuat dokumen perjanjian kinerja sebagaimana terdapat pada lampiran 1. Adapun Rincian Indikator Kinerja yang menjadi target pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Gambar 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Pung Nugroho Saksono**

Jabatan : Direktur Pemantauan dan Operasi Armada

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Pung Nugroho Saksono**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Februari 2024

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksono

Pihak Pertama
Direktur Pemantauan dan Operasi
Armada

Pung Nugroho Saksono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas (Nilai)	81
2	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat	2	Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP (Indeks)	81
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Indeks)	81
		4	Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek Bidang Pemantauan SDKP (%)	80
3	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	5	Indeks kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	94
		6	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	91
		7	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
		8	Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (Indeks)	79
		9	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Operasi Armada Pengawasan SDKP (%)	100
4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketetuan	10	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	0,5
		11	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (Indeks)	100
		12	Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP (Nilai)	81
		13	Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP (Nilai)	81
		14	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP (%)	100
		15	Inovasi yang dihasilkan Bidang Pemantauan dan Operasi Armada (Inovasi)	1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA	16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA (%)	100
		17	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)	82
		18	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat POA (Nilai)	84
		19	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		20	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	21
		21	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat POA (%)	99,4
		22	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA (%)	94
		23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA (%)	80
		24	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA (%)	80
		25	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat POA (Nilai)	75
		26	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP (Nilai)	70

NO	KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan	**Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan**	**445.134.101.000**
SK 1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	
SK 1.2	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat	
SK 1.3	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	
SK 1.4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketetuan	
SK 1.5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA	
Total Anggaran		**445.134.101.000**

Jakarta, 15 Februari 2024

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksono

Pihak Pertama
Direktur Pemantauan dan Operasi Armada

Pung Nugroho Saksono

ALOKASI ANGGARAN

Dalam mendukung Indikator Kinerja tersebut, dialokasikan anggaran dalam merealisasikan Rincian Output Lingkup Direktorat POA ditabulasikan sebagai berikut:

RINCIAN OUTPUT	VOLUME RO	ANGGARAN
Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	5150 Produk	2,587,650,000
NSPK Pemantauan dan Operasi Armada	2 NSPK	500,000,000
Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan SDKP yang Dipantau	3 Laporan	1,000,000,000
Operasional Pembinaan POKMASWAS yang Dipantau	34 Laporan	1,000,000,000
Operasi Kapal Pengawas	92 Hari Operasi	327,299,298,000
Operasi Pesawat Patroli	170 Operasi	50,000,000,000
Kapal Pengawas	10 Unit	30,000,000,000
Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	12 Unit	26,584,803,000
Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	1 Unit	6,162,350,000
TOTAL		**445,134,101,000**

BAB III
Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran capaian kinerja TW III Direktorat POA Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh nilai capaian kinerja Direktorat POA sebesar 114,77% dengan capaian indikator Nilai Kinerja Organisasi (NKO) berwarna BIRU dengan kategori ISTIMEWA. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana disajikan pada tabel Capaian Kinerja Organisasi berikut:

Gambar 3 Tangkapan Layar Capaian Kinerja Direktorat POA Tahun 2024

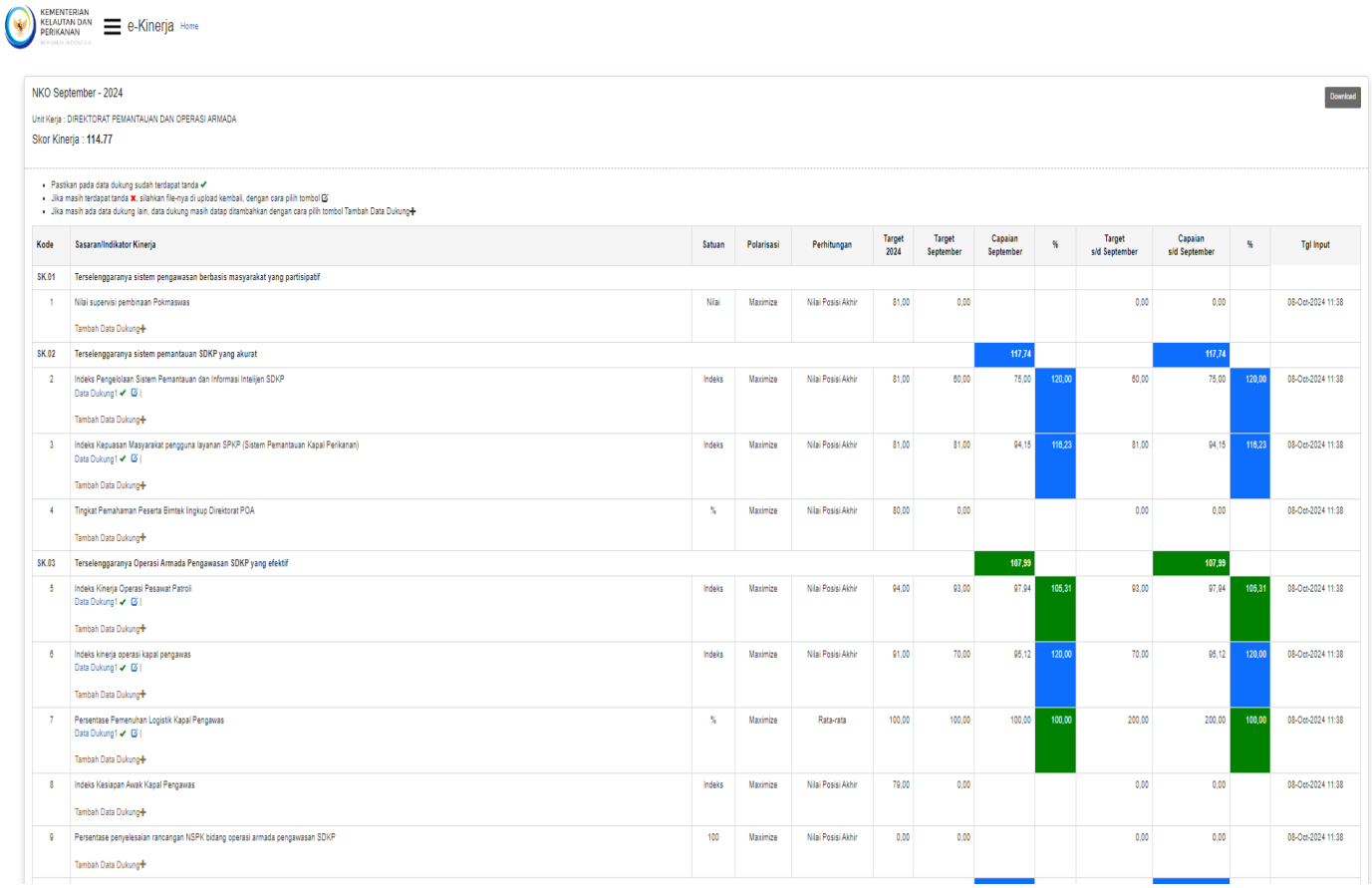

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2024	Target September	Capaian September	%	Target s/d September	Capaian s/d September	%	Tgl Input
SK.01	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif											
1	Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas Tambah Data Dukung	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	0,00			0,00	0,00		08-Okt-2024 11:38
SK.02	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat						117,74			117,74		
2	Indeks Pengelolaan Sistem Pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP Data Dukung1 ✔ Tambah Data Dukung	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	60,00	76,00	120,00	60,00	76,00	120,00	08-Okt-2024 11:38
3	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan) Data Dukung1 ✔ Tambah Data Dukung	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	81,00	94,15	116,23	81,00	94,15	116,23	08-Okt-2024 11:38
4	Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek lingkup Direktorat POA Tambah Data Dukung	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00		08-Okt-2024 11:38
SK.03	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif						197,99			197,99		
5	Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli Data Dukung1 ✔ Tambah Data Dukung	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	94,00	93,00	97,94	105,31	93,00	97,94	105,31	08-Okt-2024 11:38
6	Indeks kinerja operasi kapal pengawas Data Dukung1 ✔ Tambah Data Dukung	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	91,00	70,00	95,12	120,00	70,00	95,12	120,00	08-Okt-2024 11:38
7	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas Data Dukung1 ✔ Tambah Data Dukung	%	Maximize	Rata-rata	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	100,00	08-Okt-2024 11:38
8	Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas Tambah Data Dukung	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	79,00	0,00			0,00	0,00		08-Okt-2024 11:38
9	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang operasi armada pengawasan SDKP Tambah Data Dukung	100	Maximize	Nilai Posisi Akhir	0,00	0,00			0,00	0,00		08-Okt-2024 11:38

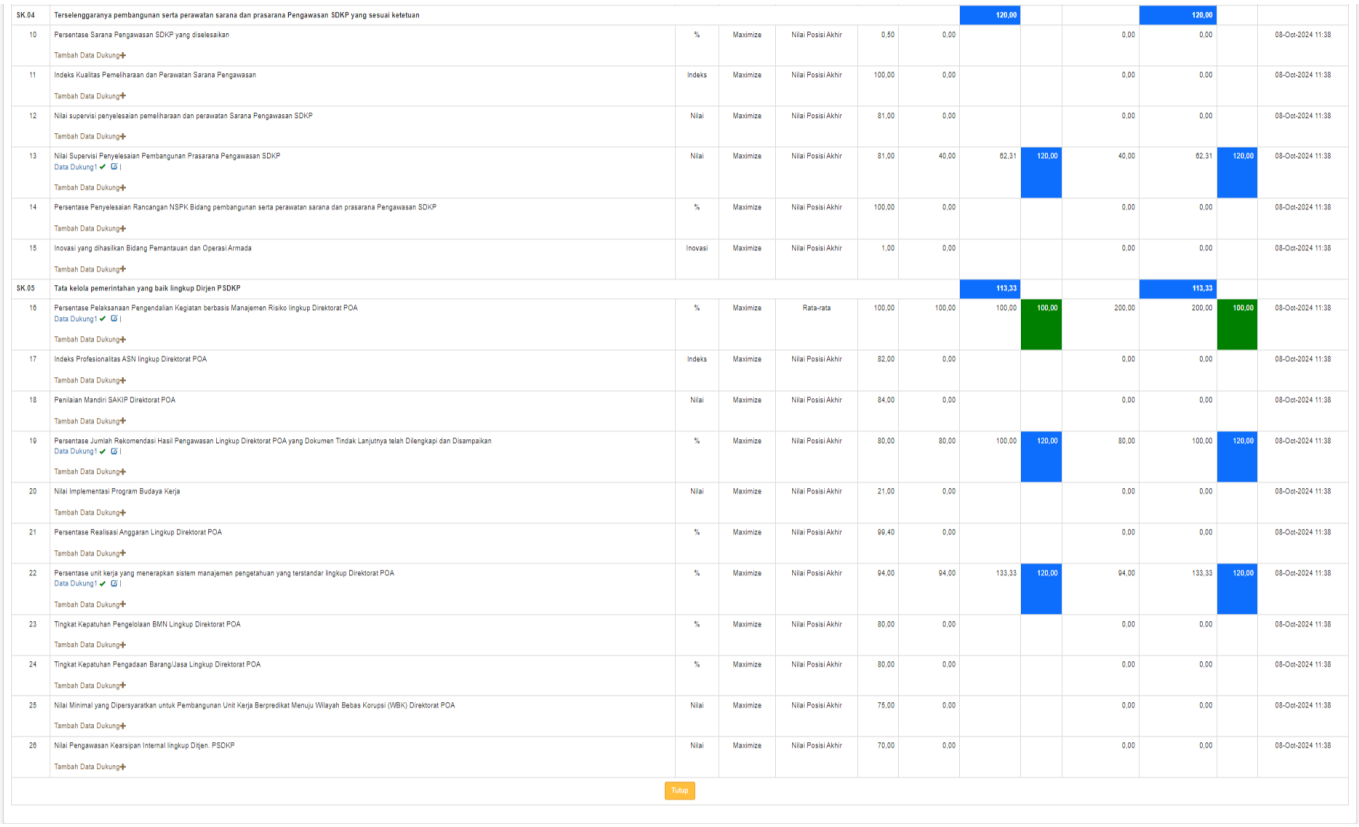

SK.04	**Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketetuan**						120,00			120,00		
10	Persentase Sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan Tambah Data Dukung	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	0,50	0,00			0,00	0,00		08-Oct-2024 11:38
11	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan Tambah Data Dukung	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		08-Oct-2024 11:38
12	Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP Tambah Data Dukung	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	0,00			0,00	0,00		08-Oct-2024 11:38
13	Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP Data Dukung1 ✔ 🖫 | Tambah Data Dukung	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	40,00	82,31	120,00	40,00	82,31	120,00	08-Oct-2024 11:38
14	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP Tambah Data Dukung	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		08-Oct-2024 11:38
15	Inovasi yang dihasilkan Bidang Pemantauan dan Operasi Armada Tambah Data Dukung	Inovasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	0,00			0,00	0,00		08-Oct-2024 11:38
SK.05	**Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Dirjen PSDKP**						113,33			113,33		
16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA Data Dukung1 ✔ 🖫 | Tambah Data Dukung	%	Maximize	Rata-rata	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	100,00	08-Oct-2024 11:38
17	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA Tambah Data Dukung	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	0,00			0,00	0,00		08-Oct-2024 11:38
18	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat POA Tambah Data Dukung	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	84,00	0,00			0,00	0,00		08-Oct-2024 11:38
19	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat POA yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan Data Dukung1 ✔ 🖫 | Tambah Data Dukung	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	100,00	120,00	80,00	100,00	120,00	08-Oct-2024 11:38
20	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Tambah Data Dukung	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	21,00	0,00			0,00	0,00		08-Oct-2024 11:38
21	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat POA Tambah Data Dukung	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	99,40	0,00			0,00	0,00		08-Oct-2024 11:38
22	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA Data Dukung1 ✔ 🖫 | Tambah Data Dukung	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	94,00	94,00	133,33	120,00	94,00	133,33	120,00	08-Oct-2024 11:38
23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA Tambah Data Dukung	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00		08-Oct-2024 11:38
24	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA Tambah Data Dukung	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00		08-Oct-2024 11:38
25	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat POA Tambah Data Dukung	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,00	0,00			0,00	0,00		08-Oct-2024 11:38
26	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP Tambah Data Dukung	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	0,00			0,00	0,00		08-Oct-2024 11:38

Tutup

Sumber: *kinerjaku.KKP.go.id, Oktober 2024*

SASARAN KEGIATAN 1

TERSELENGGARANYA SISTEM PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKAT YANG PARTISIPATIF

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif” didukung oleh satu Indikator Kinerja Utama, yaitu: "Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas."

1 Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas

Sistem pengawasan kelautan dan perikanan berbasis masyarakat adalah pendekatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan melibatkan keikutsertaan dan partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan ini mengandalkan peran serta masyarakat dalam memantau lingkungan mereka, mendeteksi potensi masalah atau ancaman, serta berkontribusi dalam penanganan situasi yang mungkin mengganggu keamanan dan ketertiban.

Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai capaian kegiatan supervisi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam kegiatan pembinaan Pokmaswas untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (Sismaswas) secara baik dan efektif. Supervisi oleh Satker Pusat untuk kegiatan pembinaan Pokmaswas yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi perlu dilakukan karena beberapa alasan berikut:

- Koordinasi dan Pengawasan, Supervisi oleh Satker Pusat memungkinkan adanya koordinasi dan pengawasan yang efektif terhadap kegiatan pembinaan Pokmaswas oleh Pemda Provinsi. Dengan adanya supervisi, Satker Pusat dapat memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku.
- Peningkatan Kualitas, Supervisi dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pembinaan Pokmaswas. Satker Pusat dapat memberikan arahan, bimbingan, dan saran yang diperlukan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kegiatan pembinaan
- Monitoring dan Evaluasi, Melalui supervisi, Satker Pusat dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan Pokmaswas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tujuan dan indikator kinerja tercapai dengan baik.
- Pengalaman dan Pengetahuan, Satker Pusat memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam pembinaan Pokmaswas. Dengan melakukan supervisi, mereka dapat berbagi pengalaman terbaik dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada Pemda Provinsi dalam melaksanakan kegiatan

pembinaan

Dengan melakukan supervisi oleh Satker Pusat, diharapkan bahwa kegiatan pembinaan Pokmaswas oleh Pemda Provinsi dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas diperoleh dari kualitas kegiatan Direktorat Pengendalian Operasi Armada dalam melakukan supervisi terhadap pembinaan Pokmaswas yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Hasil pembinaan tersebut wajib dikirimkan dalam bentuk laporan pembinaan Pokmaswas dengan merujuk pada Komponen kegiatan yang dinilai antara lain:

Gambar 4. Komponen nilai supervisi pembinaan Pokmaswas

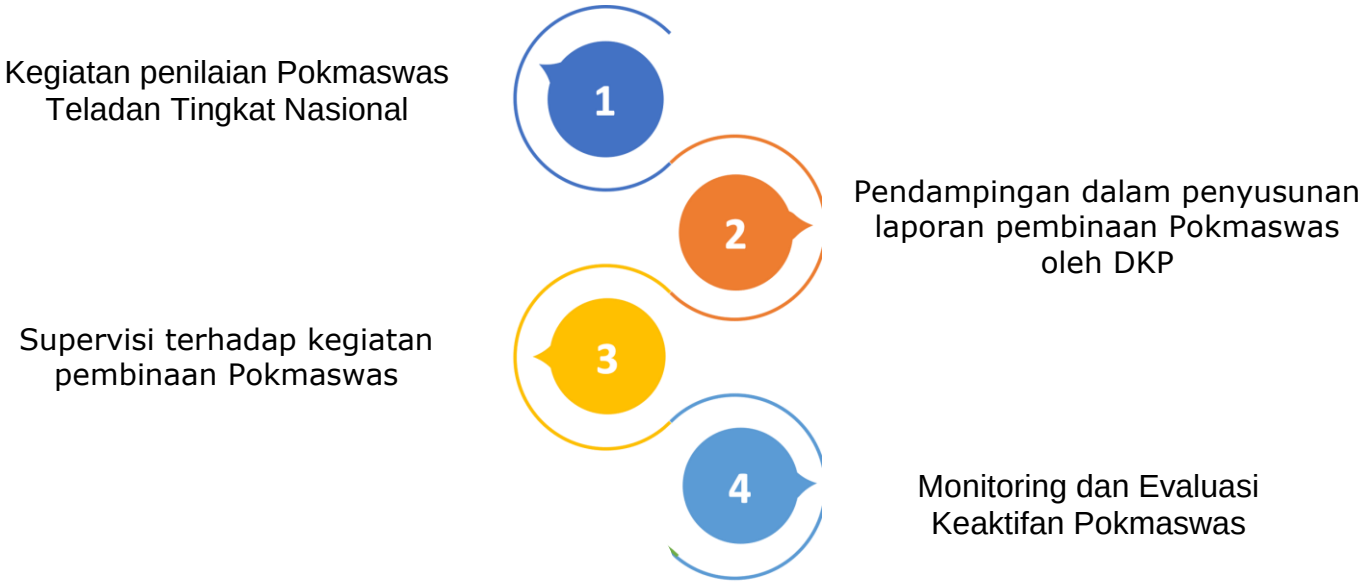

Tabel 2. Target dan Realisasi IKU-1 TW III Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian pada TW III Tahun 2024 belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode selanjutnya dikarenakan untuk IKU ini ditargetkan per semester. Namun Direktorat POA telah melakukan Kegiatan pendampingan yang dilakukan terhadap masing-masing Provinsi berupa koordinasi via online berupa komunikasi via Whatsapp, telepon komunikasi, dan zoom, sementara via offline berupa kunjungan kedinasan ke lokasi pembinaan Pokmaswas atau kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang dibuktikan dengan capaian pada TW II sebesar 49,45. Indikator kinerja ini belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru serta belum terdapat pada Renstra 2020-2024

Selama periode TW III Tahun 2024, Direktorat POA menerapkan beberapa strategi agar target IKU Nilai Supervisi Pembinaan Pokmaswas tercapai antara lain:

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya IKU 1 ini sebesar Rp1.000,000,000, hingga TW III tahun 2024 dan telah terealisasi sebesar Rp 753,332,907 atau 75,33 % dari alokasi anggaran.

SASARAN KEGIATAN 2

TERSELENGGARANYA SISTEM PEMANTAUAN SDKP YANG AKURAT

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Sistem Pemantauan SDKP yang akurat” didukung oleh 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

2 Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP

Indikator Kinerja “Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP” bertujuan untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Direktorat POA memastikan pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan kepada user pengguna hasil analisis dilakukan secara akuntabel. Analisis yang diberikan bersumber dari data Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), Ditjen PSDKP. Rincian capaian IKU 2 Direktorat POA periode Tahun 2024 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Target dan Realisasi IKU-2 TW III Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP	-	-	-	60	66,67	108,33	60	75	125	60	75	125	80	75	94

Berdasarkan tabel di atas, target untuk IKU 2 dapat dicapai secara maksimal, bahkan melampaui target. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023, capaian pada tahun 2024 sama dengan capaian 2023 realisasi indeks 75 dengan persentase 125%. Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra yaitu indeks 80, indikator ini telah tercapai sebesar indeks 94% untuk triwulan III dan akan terus meningkat pada triwulan berikutnya. Adapun indeks 60 didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4. Komponen Perhitungan IKU 2

No	Indikator	Bulan												Bobot	Perhitungan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Indikasi Pelanggaran	1	1	1	1	1	1	1	1	1				40	30
2	Analisis Kapal di Kawasan Konservasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1				20	15
3	Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup	1	1	1	1	1	1	1	1	1				20	15
4	Data untuk Ops Kapal Pengawas/Airborne Surveillance	1	1	1	1	1	1	1	1	1				20	15
	Indeks														75.00

Berdasarkan tabel 4 diatas, angka 1 pada capaian bulanan tersebut menunjukan tercapainya pemenuhan data realisasi perkomponen pada IKU 2. Sedangkan angka 0 menunjukan tidak terpenuhi data realisasi perkomponen pada IKU 2.

Indikator ini dipengaruhi oleh 4 sub indikator yaitu: Indikasi Pelanggaran, Analisis Kapal di Kawasan Konservasi, Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup, dan Data untuk Operasi Kapal Pengawas/Airborne Surveillance

1. Indikasi Pelanggaran

Indikasi pelanggaran adalah sebuah analisis yang dilakukan terhadap kapal- kapal ikan yang terdaftar di dalam sistem pemantauan kapal perikanan berkaitan dengan berbagai indikasi pelanggaran pengelolaan sumber daya perikanan.

Jenis-jenis indikasi pelanggaran antara lain pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan (DPI), laut lepas, pelabuhan pangkal, Jalur Penangkapan, beroperasi di kawasan konservasi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilarang. Hasil analisis tersebut lalu diterbitkan berupa lembar "Indikasi Pelanggaran" dan diberikan memo penyampaian setiap harinya kepada UPT terkait untuk dapat ditindak lanjuti. Untuk diketahui, Selama periode TW III Tahun 2024, Pusdal PSDKP telah menerbitkan analisis indikasi pelanggaran kapal perikanan sebanyak 2193 kapal dengan rincian sebagaimana pada Tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian analisis pelanggaran periode Januari sd Juni 2024

No	Indikasi Pelanggaran	Bulan			Total s.d Sept
		Jul	Agu	Jul	
1	Daerah Penangkapan Ikan (WPP)	25	22	25	22
2	Daerah Penangkapan Ikan (Laut Lepas)	0	3	0	3
3	Daerah Penangkapan Ikan (Luar Negeri)	3	1	3	1
4	Daerah Penangkapan Ikan (Jalur Penangkapan)	414	275	414	275
5	Pelabuhan Pangkal/Muat	10	9	10	9
6	Beroperasi tanpa SIPI/SIKPI	0	0	0	0
7	Transhipment	7	8	7	8
	TOTAL	459	318	459	318

2. Analisis Kapal di Kawasan Konservasi

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU 31/2004, menjelaskan bahwa konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Dalam konteks konservasi sumber daya ikan, konservasi ekosistem merupakan upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang.

Sesuai dengan peraturan tersebut Tim Kerja Pengendalian Sistem dan Informasi Intelijen Kelautan dan Perikanan pada bulan Juni 2024 dilakukan pemantauan terhadap Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia dan terdapat 181 kapal berizin pusat yang terpantau melakukan indikasi kegiatan penangkapan dan/atau labuh di dalam kawasan konservasi. Rincian jumlah kapal yang beroperasi di Kawasan Konservasi dapat dilihat dalam Tabel 6:

Tabel 6. Pemantauan Kapal di Kawasan Konservasi Januari-September 2024

NO	NAMA KAWASAN KONSERVASI	Labuh/ Dugaan Menangkap					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	CAGAR ALAM KEPULAUAN KARIMATA	3	1	7	3	6	12
2	KAWASAN KONSERVASI BATAM	2	0	2			
3	KAWASAN KONSERVASI BIAK NUMFOR	10	6	5	14	13	8
4	KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH DAMER PROVINSI MALUKU	0	0	1	0	0	0
5	KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH KEPULAUAN TANIMBAR PROVINSI MALUKU	2	0	1	0	0	2
6	KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH LIUKANG TANGAYA PROVINSI SULAWESI SELATAN	1	1	9	1	1	1
7	KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT	0	0	3	0	0	0
8	KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH TIMUR PULAU BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2	5	12	15	8	5
9	KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT DI PROVINSI PAPUA BARAT	0	2	1	1	1	1
10	KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN KEPULAUAN WIDI DI PROVINSI MALUKU UTARA	0	0	3	0	0	0
11	KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN SORONG SELATAN DI PROVINSI PAPUA BARAT	1	1	1	0	0	0
12	KAWASAN KONSERVASI DSAOI MAUBESI EKTENSI 1	0	0	1	0	0	0
13	KAWASAN KONSERVASI GRESIK	3	17	5	0	1	0
14	KAWASAN KONSERVASI KAYUADI	0	0	2	0	0	0
15	KAWASAN KONSERVASI KEPULAUAN ANAMBAS DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU	7	4	12	10	12	7

16	KAWASAN KONSERVASI KEPULAUAN NATUNA	1	2	16	16	15	11
17	KAWASAN KONSERVASI KEPULAUAN PADAIDO DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI PAPUA	1	0	0	0	0	0
18	KAWASAN KONSERVASI KOLEPOM	4	14	9	14	26	12
19	KAWASAN KONSERVASI KUR TAYANDO TAM	3	2	2	0	0	0
20	KAWASAN KONSERVASI LINGGA	5	4	3	4	4	5
21	KAWASAN KONSERVASI MALANG	1	2	4	0	0	0
22	KAWASAN KONSERVASI PANTAI OLELE	1	2	2	0	0	0
23	KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN ANGSANA, SUNGAI LOBAN, PULAU LAUT-PULAU SEMBILAN, KEPULAUAN SAMBARGELAP, DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	12	11	2	5	11	18
24	KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BELITUNG DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1	0	0	0	0	0
25	KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BURUWAY, ARGUNI, KAIMANA, TELUK ETNA, DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI PAPUA BARAT	2	3	5	2	3	1
26	KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KEPULAUAN ARU BAGIAN TENGGARA DAN LAUT DI SEKITARNYA DI PROVINSI MALUKU	9	7	5	1	11	6
27	KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL LAUT SAWU DAN SEKITARNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	9	6	1	9	0	0
28	KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DONGGALA, BUOL, TOLITOLI, DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH	0	0	1	0	0	0
29	KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULAU RAO-TANJUNG DEHEGILA DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI MALUKU UTARA	0	2	0	0	1	0
30	KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEPULAUAN DERAWAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0	2	0	0	1	0
31	KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEPULAUAN SULA DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI MALUKU UTARA	5	2	9	5	4	1
32	KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEPULAUAN TATOARENG DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI SULAWESI UTARA	1	1	1	1	1	1
33	KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PULAU KOON, PULAU GOROGOS, PULAU NUKUS, PULAU NEDEN, DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI MALUKU	0	0	1	0	0	0
34	KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PULAU RANDAYAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0	0	1	1	0	0
35	KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL MOROWALI,	0	1	0	0	0	0

	MOROWALI UTARA, DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH						
36	KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PULAU-PULAU BATU NIAS SELATAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI SUMATERA UTARA	0	1	1	0	1	1
37	KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAPANULI TENGAH DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI SUMATERA UTARA	0	1	0	0	1	1
38	KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL UJUNGNEGORO-ROBAN KABUPATEN BATANG DI PROVINSI JAWA TENGAH	2	1	2	3	1	3
39	KAWASAN KONSERVASI POPAYA	1	1	0			
40	KAWASAN KONSERVASI PULAU BATANG DAN PULAU SEGAMA	1	1	3	1	1	0
41	KAWASAN KONSERVASI PULAU ENGGANO	0	0	9	0	1	0
42	KAWASAN KONSERVASI PULAU SANGIANG	0	0	1	1	0	0
43	KAWASAN KONSERVASI PULAU BIAWAK	1	0	0	0	0	0
44	KAWASAN KONSERVASI PULAU WUNGA	1	0	2	0	0	0
45	KAWASAN KONSERVASI RUPAT UTARA	4	2	4	3	3	3
46	KAWASAN KONSERVASI SIAU TAGULANDANG BIARO	0	0	1	1	1	0
47	KAWASAN KONSERVASI SIROMBU	0	0	1	0	0	0
48	KAWASAN KONSERVASI SUMENEP	1	1	2	1	4	3
49	KAWASAN KONSERVASI TANJUNG PANJANG	1	2	1	1	2	2
50	KAWASAN KONSERVASI WAY KAMBAS	1	0	0	0	0	0
51	TAMAN NASIONAL BUNAKEN	1	0	2	0	0	0
52	TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA	1	1	4	1	4	3
53	TAMAN NASIONAL KEPULAUAN SERIBU	13	13	16	1	3	1
54	TAMAN NASIONAL KEPULAUAN TOGEAN	3	0	2	1	1	0
55	TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE	1	0	0	0	0	0
56	TAMAN NASIONAL WAKATOBI	1	0	1	1	2	0
57	TAMAN WISATA ALAM PULAU BANYAK	1	2	2	0	0	0
58	TAMAN WISATA ALAM TELUK MAUMERE	1	0	0	0	0	0
59	KAWASAN KONSERVASI BANGKA SELATAN	0	0	0	1	0	0
100	KAWASAN KONSERVASI JEMBER	0	0	0	1	1	2
101	KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN MISOOL UTARA	0	0	0	2	3	1
102	KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KUBU RAYA DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0	0	0	2	3	3
103	KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL LAMPUNG SELATAN	0	0	0	1	0	0
104	KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PALOH DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0	0	0	0	2	0
105	KAWASAN KONSERVASI PULAU-PULAU BATU TIMUR	0	0	0	1	1	0
106	TAMAN WISATA ALAM PULAU MARSEGU	0	0	0	1	1	
Total			121	124	181	126	155

114

3. Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup, dinyatakan bahwa setiap kapal pengangkut ikan hidup berbendera asing diizinkan masuk ke wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia paling banyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun.

Sesuai dengan peraturan tersebut Tim Kerja Pengendalian Sistem dan Informasi Intelijen Kelautan dan Perikanan telah melakukan pemantauan terhadap 37 kapal pengangkut ikan hidup yang terpantau aktif selama bulan Sept 2024.

Tabel 7. Daftar Keaktifan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Juni 2024

No	Bulan	Jumlah Kapal
1	Januari	30
2	Februari	29
3	Maret	37
4	April	34
5	Mei	36
6	Juni	36
7	Juli	35
8	Ags	37
9	Sept	37

4. Data untuk Operasi Kapal Pengawas / Airborne Surveillance

Penyiapan data kapal perikanan berdasarkan sistem pemantauan kapal perikanan (SPKP) dan Automatic Identification System (AIS) dilaksanakan dalam rangka mendukung operasi kapal pengawas dan pelaksanaan airborne surveillance. Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan penerbitan data untuk operasi kapal pengawas yang dilakukan setiap dua minggu.

Keberhasilan dalam mencapai target IKU ini dipengaruhi oleh terpenuhinya seluruh komponen dan upaya maksimal Direktorat POA khususnya Tim Kerja Pengendalian Sistem dan Informasi Intelijen Kapal Pengaws serta keterlibatan pimpinan dalam melakukan monitoring secara rutins.

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya IKU 2 ini sebesar Rp6,162,350,000,00 dan sampai dengan TW III tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp 3,028,062,539,00 atau 49,14% dari alokasi anggaran.

3 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan)

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengisian kuesioner Sistem Kepuasan Masyarakat Layanan SPKP menggunakan digital form pada Tools Survei Kepuasan (Aplikasi SI SUSAN) KKP, dimana hasil penilaian pengguna SPKP langsung diolah secara otomatis pada Aplikasi SI SUSAN. Aplikasi SI SUSAN merupakan aplikasi yang dibangun oleh Pusdatin KKP dalam rangka untuk membantu pengambilan responden dan menghitung nilai SKM yang sesuai dengan Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SKM Secara Realtime. Indeks Kepuasan Masyarakat terdiri dari indikator kuantitatif, yakni:

1. Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmiter (SKAT)

Layanan penerbitan dokumen tertulis yang menyatakan bahwa transmiter SPKP pada kapal perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan dan dapat dipantau pada pusat pemantauan kapal perikanan.

2. Pemberian Akses Pemantauan Kapal Perikanan

Dengan adanya inovasi pengajuan secara mandiri, secara otomatis Pengguna akan mendapatkan akses untuk mengajukan layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan sekaligus untuk memantau kapal perikanan.

3. Analisis Pergerakan Kapal Perikanan

Bagi perusahaan perikanan yang memiliki keperluan khusus dalam melakukan tracking kapal perikanannya dapat mengetahui posisi pergerakan kapal perikanan yang dimiliki dengan cara mengajukan permohonan pelayanan analisis kapal perikanan kepada Direktur Jenderal PSDKP.

Tabel 8.. Target dan Realisasi IKU 3 Periode TW III Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan)	-	-	-	80	92,34	115,43	80	92,01	115,01	81	94,15	116	80	94,21	117,76

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian pada Tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 94,15 dari target sebesar 81 sehingga persentase capaian sebesar 116%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023, terdapat kenaikan sebesar 4,8% dimana capaian tahun 2023 adalah sebesar 92,01. Adapun target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 yaitu sebesar 80. Jika melihat capaian pada

tahun 2020-2024, target pada Renstra berpotensi tercapai.

Capaian indikator ini diperoleh dari pelaksanaan survey kepuasan masyarakat secara offline bertempat di Hotel Probolinggo, Jawa Timur dengan melibatkan pengguna layanan (Pemilik Kapal) pada tanggal 19 September 2024. Selain itu, survey kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara online oleh pengguna layanan (Pemilik Kapal) dengan mengisi link google form yang telah disiapkan oleh Pusdatin KKP.

Potret hasil survey kepuasan masyarakat periode TW III Tahun 2024 berdasarkan Aplikasi Si Susan sebagai berikut :

Gambar 5 Tangkapan Layar Aplikasi Si Susan

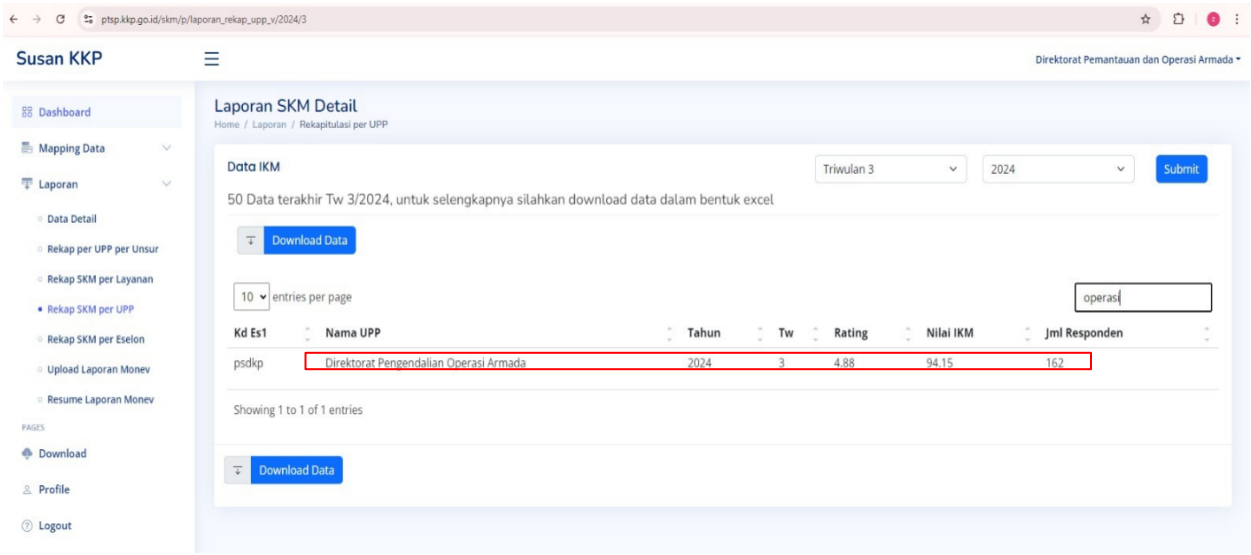

Keberhasilan capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP serta peningkatan kinerja pada tahun 2024 beberapa faktor sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana aksi pelaksanaan survey kepuasan masyarakat tahun 2024;
2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna SPKP;
3. Adanya monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat.

Alokasi anggaran tahun 2024 untuk mendukung tercapainya IKU 3 ini sebesar Rp362.587.000,00 dan sampai dengan TW III tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp157,280,870,00 atau 43,38% dari alokasi anggaran.

4 Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek lingkup Direktorat POA

Indikator Kinerja “Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorar POA” bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman Peserta BIMTEK yang

dilaksanakan oleh Direktorat POA. Capaian Tingkat Pemahaman dari Peserta BIMTEK diperoleh dari Ujian/Test yang dilakukan sesudah materi BIMTEK diberikan (Post Test) yang peserta Bimtek berasal dari stakeholder atau para pemilik kapal perikanan.

Tabel 9. Target dan Realisasi IKU 4 Periode TW III Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020			CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU “Tingkat Pemahaman Peserta BIMTEK Lingkup Direktorat POA” belum ada capaian dikarenakan IKU tersebut akan dilakukan perhitungan di akhir tahun 2024, bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dikarenakan belum dilakukan pengukuran. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 belum bisa dibandingkan.

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Direktur POA yang tinggi dalam memastikan terlaksananya Bimtek SPKP di bidang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;

2. Perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang menjadi prioritas untuk pemahaman para pemilik Kapal Perikanan dalam penggunaan Aplikasi Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya IKU 4 ini sebesar Rp162,350,000,00 dan sampai dengan TW III Tahun 2024 belum ada realisasi karena kegiatan belum dilaksanakan.

SASARAN KEGIATAN 3

TERSELENGGARANYA OPERASI ARMADA PENGAWASAN SDKP YANG EFEKTIF

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif" diukur dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

5 Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli

Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Pesawat Patroli agar terwujudnya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif. Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
5. Persentase Jumlah Kapal yang di Validasi;
6. Persentase Operasi di Wilayah WPPNRI yang Rawan dan IUUF yang tinggi KIA (WPPNRI 571, 711, 716, 717);
7. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap pemantauan Wilayah Pesisir,Pulau-pulau kecil, dan Kawasan Konservasi;
8. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap Patroli Terkoordinasi Regional, Nasional dan Internasional;
9. Jumlah Dukungan kegiatan lainnya (Misi SAR, Kemanusiaan, Dukungan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan).

Tabel 10. Target dan Realisasi IKU 5 Periode TW III Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Indeks kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	-	-	-	92	99,12	107,74	93	97,51	104,8	93	97,94	105,31	-	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian pada TW III Tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 97.94 dengan persentase capaian sebesar 105,31%. Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada Tahun 2023, mengalami penurunan sebesar 0.5%.

Gambar 6 Ilustrasi Operasi Pesawat Patroli

Hasil capaian yang melebihi target ini dikarenakan kegiatan operasi pesawat patroli telah mencapai target operasi sebagaimana telah ditetapkan. Target tersebut mencakup jumlah kapal perikanan yang dipantau, coverage area pengawasan, capaian hari operasi, tindak lanjut atas target operasi yang diberikan, jumlah kapal yang divalidasi, dukungan pemantauan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengawasan konservasi, dan dukungan terhadap patroli terkoordinasi baik nasional maupun regional. Capaian ini mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan telah tercapai dengan maksimal. Hal ini tidak terlepas dari upaya pembinaan yang dilakukan selama periode bulanan secara langsung oleh Direktur Pengendalian Operasi Armada. IKU ini tidak terdapat target Renstra tahun 2020-2024.

Selama periode operasi TW III Tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 22 (dua puluh dua) periode operasi. Dari pelaksanaan operasi tersebut diperoleh sebanyak 162 hari operasi. Pesawat yang digunakan antara lain: Pesawat *Maritime Patrol Aircraft* MPA ATR 42-300 PK-YRE dan Pesawat Milik Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Kementerian Perhubungan. Operasi dilaksanakan secara terintegrasi dengan armada kapal pengawas di laut antara lain:

1.	Periode I	:	Operasi Mandiri
2.	Periode I-A	:	KP. HIU 12, KP. HIU 01
3.	Periode II	:	Operasi Mandiri
4.	Periode II-A	:	KP. ORCA 04
5.	Periode III	:	Operasi Mandiri
6.	Periode III-A	:	KP. ORCA 05
7.	Periode IV	:	KP. ORCA 06, KP. PAUS 01, KP. ORCA 04
8.	Periode IV-A	:	Operasi Mandiri
9.	Periode IV-B	:	KP. ORCA 06, KP. PAUS 01, KP. ORCA 04
10.	Periode V	:	Operasi Mandiri
11.	Periode VA	:	KP. PAUS 01, KP. ORCA 05
12.	Periode VB	:	Operasi Mandiri
13.	Periode VI	:	Operasi Mandiri
14.	Periode VI-A	:	KP. ORCA 04, KP. ORCA 06
15.	Periode VI-B	:	Operasi Mandiri
16.	Periode VII	:	Operasi Mandiri
17.	Periode VII-A	:	KP. ORCA 03
18.	Periode VIII	:	KP. ORCA 04 KP. ORCA 06
19.	Periode VIII-A	:	Operasi Mandiri
20.	Periode IX	:	Operasi Mandiri
21.	Periode IX-A	:	Operasi Mandiri
22.	Periode IX-B	:	Operasi Mandiri

Adapun hasil operasi terintegrasi antara unsur pesawat patroli udara dengan kapal pengawas perikanan sampai dengan Juni 2024 ditabulasikan pada lampiran. Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Responsif terhadap realisasi penggunaan pesawat udara harian sehingga dapat menyesuaikan volume harian penggunaan jam operasi.
2. Pergerakan pesawat udara dilaksanakan pada wilayah-wilayah prioritas dengan indikasi kerawanan sedang dan tinggi serta menambah target operasi pengawasan kelautan yang berada pada wilayah-wilayah yang beririsan dengan pengawasan perikanan sehingga meningkatkan capaian operasi;
3. Tersedia data dan informasi dari Pusat Pengendalian Ditjen PSDKP (Command Center) yang mendukung operasi pengawasan SDKP melalui udara.

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya IKU 5 ini sebesar Rp50.000.000.000,00 dan sampai dengan TW III tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp 48,970,315,672,00 atau 97,94% dari alokasi anggaran.

6 Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasi Kapal Pengawas agar

terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan sebanyak 9 variabel, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
5. Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku IUU Fishing;
6. Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang;
7. Jumlah Pemutusan Rumpon Ilegal;
8. Dukungan Kegiatan Kapal Pengawas terhadap Kegiatan Nasional, Regional, dan Internasional;
9. Dukungan Kegiatan Sosial dan Penyelamatan.

Tabel 11. Rincian capaian IKU 6 Direktorat POA TW III Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)							87,6	96,19	109.8%	70	95,12	135,88	89	95,12	106.8%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian pada Tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 95,12 dengan persentase capaian sebesar 135,8%. Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada Tahun 2023, terdapat peningkatan capaian realisasi dari yang sebelumnya sebesar 109,8%. Peningkatan capaian ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah target pemeriksaan kapal perikanan yang dilakukan oleh kapal pengawas pada Triwulan II tahun 2024 ini. Peningkatan hasil target pemeriksaan kapal perikanan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan tingkat kepatuhan kapal perikanan dan juga mendukung kebijakan program Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Adapun target pada Renstra 2020-2024 adalah indeks 89. Hingga TW III tahun 2024, capaian IKU 6 masih sesuai dengan menuju target Renstra 2020-2024.

Gambar 7 Kegiatan Menghentikan, Memeriksa dan Menahan (henrikhan) oleh Kapal Pengawas

Selama periode TW III Tahun 2024 Kapal Pengawas telah melaksanakan Operasi Mandiri Kapal Pengawas dengan jumlah hari sebanyak 698 hari operasi dari 12 Kapal Pengawas dengan rata-rata hari operasi setiap kapal pengawas sebanya 58 hari operasi. Adapun hasil operasi kapal pengawas periode TW III telah berhasil memeriksa sebanyak 1877 Kapal (KII 1862, KIA 15). Jumlah kapal yang ditangkap sebanyak 34 Kapal (KII 23, KIA 11).

Tabel 12. Hasil Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Ditjen PSDKP sampai dengan TW III Tahun 2024

NO	NAMA KAPAL PENGAWAS	HARI OPS	DIPERIKSA			DITANGKAP		
			KII	KIA	JML	KII	KIA	JML
1	KP. ORCA 01	55	131	0	131	12	0	12
2	KP. ORCA 02	28	84	2	86	0	2	2
3	KP. ORCA 03	14	80	0	80	0	0	0
4	KP. ORCA 04	32	55	1	56	2	1	3
5	KP. ORCA 05	64	178	0	178	1	0	1
6	KP. ORCA 06	43	58	2	60	1	2	3
7	KP. BARAKUDA 01	43	137	0	137	0	0	0
8	KP. BARAKUDA 02	47	155	0	155	2	0	2
9	KP. HIU MACAN TUTUL 01	10	58	0	58	1	0	1
10	KP. HIU MACAN TUTUL 02	16	107	0	107	0	0	0
11	KP. PAUS 01	73	213	1	214	1	1	2
12	KP. AKAR BAHAR 01	30	0	0	0	0	0	0
JUMLAH TOTAL		455	1256	6	1262	20	6	26

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Tersedianya logistik kapal pengawas sesuai rencana operasi yang ditetapkan;
2. Tersedianya Rencana Operasi (RO) berdasarkan sumber data yang tersedia dari Pusat Pengendalian Ditjen PSDKP (*Command Center*) dan sumber informasi lainnya;
3. Monitoring dan evaluasi terhadap capaian operasi kapal pengawas dilakukan secara berkala.

Alokasi anggaran tahun 2024 untuk mendukung tercapainya IKU 6 ini Rp289,804,729,000,00 dan sampai dengan TW III Tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp231,448,242,106,00 atau 79,56% dari total pagu.

7 Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas

Indikator ini digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas dalam mendukung operasi pengawasan SDKP. Logistik dimaksud meliputi Logistik Kapal dan Logistik Personel. Logistik kapal terdiri dari Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas, sementara itu logistik personel terdiri dari : Bahan Makanan, Air Tawar, Alat-alat Pelayanan (ATK dan Bahan Komputer), dan senjata api. Capaian TW III tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 serta target akhir Renstra 2024 ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 13. Target dan Realisasi IKU 7 Periode TW III Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100		

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pada Tahun 2024 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 maupun periode akhir renstra 2020-2024 dikarenakan indikator tersebut merupakan inisiatif baru pada TW IV tahun 2023. Adapun rincian capaian setiap komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Target dan Realisasi IKU 7 Periode TW III Tahun 2024

No	Komponen	Target	Realisasi	%
1	Pemenuhan Kebutuhan BBM (30%)	30%	30%	100
2	Pemenuhan Kebutuhan Pelumas (20%)	20%	20%	100
3	Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan AKP (25%)	25%	25%	100

4	Pemenuhan Kebutuhan Air Tawar (15%)	15%	15%	100
5	Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan (5%)	5%	5%	100
6	Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (5%)	5%	5%	100
	Total Nilai	100	100	100

Kegiatan pada tabel diatas adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengisian bahan bakar sesuai dengan jadwal pengajuan BBM kapal pengawas, melaksanakan pemenuhan bahan makanan/natura, air bersih, minyak pelumas, alat - alat pelayanan dan pelaporan senjata api tepat waktu sesuai dengan periode triwulanan yang telah di tetapkan;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke kapal pengawas terkait pelaksana pekerjaan secara berkala terkait pengisian bbm melalui aplikasi SIGOTIK maupun secara manual, bahan makan/natura, air bersih, minyak pelumas, alat-alat pelayanan dan pemenuhan senjata api;
3. Melaksanakan pendampingan dan koordinasi dengan pihak pertamina baik pusat maupun UPT PSDKP;
4. Menyusun dokumen manajemen risiko dan melakukan pemantauan risiko terhadap kegiatan Logistik.

Gambar 8. Pengisian Bahan Bakar Minyak KP Barakuda 01 dan Pemenuhan Minyak Pelumas KP. Paus 01

Keberhasilan mencapai target IKU pada tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Komitmen dari Direktur Pengendalian Operasi Armada dalam kegiatan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, baik mendukung penangkapan ikan terukur berbasis kuota maupun operasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil guna menertibkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan ekologi sebagai panglima agar pengelolaan sumber daya kelautan bisa Lestari. Untuk mendukung kegiatan tersebut Direktorat POA memaksimalkan ketersediaan logistik Kapal Pengawas;
2. Pemantauan manajemen risiko dengan cara mengawasi dan memantau risiko secara terus menerus serta melakukan tinjauan berkala terhadap efektivitas strategi pengelolaan risiko; dan
3. Optimalisasi penggunaan Sistem Pengendalian Logistik (SIGOTIK).

Alokasi anggaran tahun 2024 untuk mendukung tercapainya IKU 7 ini Rp289,804,729,000,00 dan sampai dengan TW III Tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp231,448,242,106,00 atau 79,56% dari total pagu.

8 Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas

Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (AKP) merupakan ukuran kesiapan ASN AKP (Kelas I – IV) berdasarkan kualifikasi pendidikan, sertifikat keahlian pelaut, sertifikat keterampilan pelaut, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (MCU), dan psikotest pemegang senjata api, dalam melaksanakan tugas sesuai jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara. Rincian capaian IKU 8 Direktorat POA periode TW III Tahun 2024 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 15. Target dan Realisasi IKU 8 Periode TW III Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian kinerja pada TW III tahun 2024 belum terdapat realisasi capaian target dikarenakan pengukuran dilaksanakan pada periode akhir tahun atau TW IV.

Keberhasilan mencapai target IKU pada tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Medical Check Up (MCU) bagi Awak Kapal Pengawas.
2. Telah mengajukan daftar nama awak kapal yang akan melaksanakan peningkatan pendidikan (Izin Belajar)

Alokasi anggaran tahun 2024 untuk mendukung tercapainya IKU 8 ini Rp289,804,729,000,00 dan sampai dengan TW III Tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp231,448,242,106,00 atau 79,56% dari total pagu.

9 Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Operasi Armada Pengawasan SDKP

Persentase Penyelesaian rancangan kebijakan pemerintah di bidang Pengawakan dan Logistik pada Tahun yaitu pada tahun 2024 ini Kelompok Pengawakan dan Logistik menyusun Keputusan Direktur Jenderal PSDKP terkait SOP Rancangan Petunjuk teknis Penggunaan, Pemeliharaan dan Pemusnahan Senjata mesin Kal.12.7mm (SM5) Kapal Pengawas lingkup Direktorat POA dimana sampai dengan TW III tahun 2024 telah memasuki tahap Penyusunan Identifikasi Substansi, Outline, Zero Draft. Keputusan Direktur Jenderal ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Direktorat POA dalam pengelolaan dan penggunaan Senjata Mesin Kal. 12.7mm bagi setiap Awak Kapal Pengawas dalam meningkatnya kinerja Awak Kapal pengawak.

Rincian capaian IKU 9 Direktorat POA periode Tahun 2024 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 16. Target dan Realisasi IKU 9 Periode TW III Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Persentase Rancangan NSPK Bidang Operasi Armada Pengawasan SDKP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2024, capaian IKU “Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pengawasan SDKP Lingkup Direktorat POA” ditargetkan sebesar 100%. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode TW III Tahun 2024 yaitu belum terdapat realisasi capaian target dikarenakan pengukuran dilaksanakan pada periode akhir tahun atau TW IV. Sementara itu, tidak terdapat target pada Renstra 2024.

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya IKU 9 ini sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp205,721,400,00 atau sebesar 41,14%.

SASARAN KEGIATAN 4

TERSELENGGARANYA PEMBANGUNAN SERTA PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN SDKP YANG SESUAI KETENTUAN

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

10 Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan

Indikator Kinerja "Persentase Prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan" IKU ini bertujuan untuk mengukur persentase penyelesaian jumlah armada dan fasilitas pendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang akan dibangun di tahun berjalan.

Pada tahun 2024 direncanakan diadakan penambahan jumlah sarana pengawasan berupa kapal pengawas sebanyak 10 unit dengan menggunakan skema PHLN dari Pemerintahan Spanyol. Sebanyak 6 kapal akan dibangun di Indonesia dan 4 Unit akan diselesaikan di Spanyol. Akan tetapi kegiatan dapat dimulai menunggu terbitnya atau ditandatangani nya Loan Agreement antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Spanyol. Rincian capaian IKU 10 Direktorat POA periode TW III Tahun 2024 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 17. Target dan Realisasi IKU 10 Periode TW III Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Persentase Prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sampai dengan akhir Triwulan III 2024, IKU ini belum ada capaian, direncanakan pengukuran dilaksanakan pada Triwulan IV 2024. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk merealisasikan target tersebut, antara lain:

1. Menunggu kebijakan terkait dengan peningkatan sarana pengawas pada tahun anggaran 2024.
2. Menyiapkan dokumen administrasi seperti dokumen penyusunan jadual palang, rencana proses pendampingan atau supervisi, menyusun progres pembangunan yang dapat menunjang kegiatan peningkatan sarana, jika ada arah kebijakan

pembukaan blokir anggaran.

Alokasi anggaran tahun 2024 untuk mendukung tercapainya IKU 10 ini sebesar Rp30.000.000.000,00 dan sampai dengan TW III tahun 2024 belum ada realisasi karena anggaran masih diblokir administratif.

11 Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP

Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran (indeks) yang digunakan untuk menilai kualitas kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan yang telah dilakukan sehingga kapal pengawas dapat dinyatakan ‘’Laik Operasi’’. Indeks kualitas dimaksud di atas didapatkan berdasarkan laporan hasil survey yang dilakukan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang menyatakan sebuah kapal pengawas yang telah disurvey masuk dalam kategori ‘’Laik Operasi’’ atau ‘’Tidak Laik Operasi’’.
Adapun capaian IKU Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP sampai dengan TW III tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 18. Target dan Realisasi IKU 11 Periode TW III Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan (Indeks)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian IKU 11 pada TW III tahun 2024 belum ada pencapaian, karena kegiatan dimaksud baru akan dilaksanakan pada periode TW IV atau pada akhir periode Semester II tahun 2024.
Survey kondisi dan penilaian teknis oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) terhadap kapal pengawas yang dikelola oleh Direktorat Pengendalian Operasi Armada dilakukan menggunakan metode Condition Assesment Programe (CAP), yaitu program penilaian kondisi kapal, baik lambung, permesinan, maupun sistem operasinya dimana hasil penilaian dari kondisi kapal tersebut akan disajikan dalam bentuk CAP Grading dengan skala 1 sampai dengan 4 dimana skor tertinggi yaitu pada skala 4 (empat) dengan predikat ‘’excellent’’. Hasil penilaian/survey terhadap Kapal Pengawas di Direktorat Pengendalian Operasi Armada pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19. Hasil Penilaian (Survey) BKI Pada Tahun 2024

No	Nama Kapal	Hasil Penilaian	CAP Grading
1.	Akar Bahar 01	-	-
2.	Paus 01	-	-
3.	Hiu Macan Tutul 01	-	-
4.	Hiu Macan Tutul 01	-	-
5.	Orca 01	-	-
6.	Orca 02	-	-
7.	Orca 03	-	-
8.	Orca 04	-	-
9.	Orca 05	-	-
10.	Orca 06	-	-
11.	Barakuda 01	-	-
12.	Barakuda 02	-	-

Dalam rangka mencapai target tersebut, terdapat beberapa hal yang sedang dan akan dilakukan oleh Direktorat POA diantaranya sebagai berikut:

1. Menyusun jadwal perawatan dan pemeliharaan kapal pengawas yang terdiri dari perawatan pencegahan, perawatan prediktif, dan perawatan darurat secara efisien dan berkesinambungan;
2. Melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas dengan pelaksana pekerjaan secara berkala;
3. Menyusun dokumen manajemen risiko, mengimplementasikan, dan melakukan pemantauan risiko terhadap kegiatan perawatan;
4. Menurunkan tim supervisi kegiatan perawatan secara berkala untuk melakukan pemantauan hasil perawatan dan memvalidasi detail pekerjaan di lapangan; dan
5. Senantiasa berkonsultasi dengan APIP terkait pelaksanaan dan monitoring perawatan kapal pengawas.

Alokasi anggaran tahun 2024 untuk mendukung tercapainya IKU 11 ini sebesar Rp.199.800.000,00 dan sampai dengan akhir TW III tahun 2024 belum ada realisasi.

12 Nilai Supervisi Penyelesaian Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP

Nilai Supervisi Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran untuk mengukur kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang telah dilakukan oleh UPT, supervisi dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian Operasi Armada dan hasilnya dituangkan dalam sebuah laporan supervisi. Pengukuran dilakukan berdasarkan jumlah kegiatan supervisi pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung

kesiapan operasi pengawasan SDKP. Supervisi dilaksanakan secara daring dan/atau kunjungan langsung ke lokasi dengan tujuan untuk memonitor dan mengevaluasi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PSDKP.
Pada tahun 2024 Sarana Pengawasan SDKP yang dinilai meliputi : Kapal Pengawas Kelas III sebanyak 12 unit, Kapal Pengawas Kelas IV sebanyak 10 unit dan Kapal Pengawas Kelas VI sebanyak 91 unit (Speedboat, Rigid Inflatable Boat, dan Rubber Boat). Penyelesaian Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP meliputi perawatan pencegahan, perawatan prediktif dan perawatan darurat. Capaian IKU Nilai Supervisi Penyelesaian Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan sampai dengan TW III tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 20. Target dan realisasi IKU-12 periode TW III Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nilai Realisasi IKU 12 pada TW III tahun 2024 belum ada karena penilaian capain IKU dilaksanakan pada TW IV atau semester II. Nilai indikator kinerja ini didapatkan dari jumlah dokumen laporan supervisi pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dilakukan di UPT lingkup Ditjen PSDKP.
Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai target adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan jadwal supervisi yang tepat dan akurat sesuai kebutuhan;
2. Koordinasi yang baik dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kapal Pengawas.
3. Metode pelaksanaan yang efektif dan efisien.
4. Monitoring dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP secara berkala dan rutin.

Alokasi anggaran tahun 2024 untuk mendukung tercapainya IKU 12 ini sebesar Rp.285,395,000,00 dan sampai dengan akhir TW III tahun 2024 telah ada realisasi sebesar Rp.262,149,362,00 atau 91,85%.

13 Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP

Nilai supervisi adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kegiatan supervisi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP di lingkungan Ditjen PSDKP. Supervisi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP adalah penilaian kegiatan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi.

Prasarana pengawasan SDKP sesuai dengan Perdirjen PSDKP nomor 10/DJPSDKP/2020 tentang Penyiapan Prasarana Pengawasan SDKP terbagi menjadi dua jenis yaitu prasarana pengawasan SDKP utama dan pendukung.

Pembangunan prasarana pengawasan dilaksanakan oleh UPT lingkup Ditjen PSDKP dan pelaksanaannya disupervisi oleh Direktorat Pengendalian Operasi Armada selaku pembina teknis kegiatan. Supervisi dilakukan pada setiap tahap pembangunan, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan proses pembangunan prasarana. Penilaian IKU dimulai pada saat kegiatan Perencanaan Teknis, antara lain penilaian terhadap ketersediaan dokumen perencanaan yang disusun oleh Konsultan Perencana. Dokumen tersebut terdiri dari Gambar Teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKSS) dan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Penilaian kegiatan Pelaksanaan Konstruksi didasarkan pada penilaian terhadap dokumen yang disusun oleh Penyedia Jasa Konstruksi yang terdiri dari laporan kegiatan pembangunan, shop drawing, jadwal kerja/kurva S, as built drawing. Penilaian kegiatan Pengawasan Konstruksi didasarkan pada penilaian terhadap dokumen yang disusun oleh Konsultan Pengawas yang terdiri dari laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan. Pada Tahun 2024, dilaksanakan pembangunan prasarana pada UPT Ditjen PSDKP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Nilai Supervisi Pembangunan Prasarana di UPT

NILAI SUPERVISI PENYELESAIAN PEMBANGUNAN PRASARANA PSDKP TRIWULAN III												
NO	PRASARANA PSDKP YANG DIBANGUN	DOKUMEN YANG DINILAI										BOBOT TIAP PEMBANGUNAN
		Perencanaan Teknis				Pembangunan Konstruksi/Fisik				Pengawasan Pembangunan		
		Gambar Teknis/DED	RAB	Hitungan TKDN	RKSS	Shop Drawing	Kurva S	Laporan	Asbuilt Drawing	Laporan Mingguan	Laporan bulanan	
1	Pematangan Lahan PSDKP Jakarta	10	10	10	10	10	10		10	10	10	90
2	Pembangunan Gudang PSDKP Pontianak	10	10	10	10	10	10			10	10	80
3	Pembangunan Pos Wilker PSDKP Berau/Derawan	10	10	10	10		10			10		60
4	Pembangunan Gudang PSDKP Lampulo	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
5	Pembangunan Pos Pengawasan SDKP Bungus/Padang	10	10	10	10		10			10		60
6	Rehabilitasu Pos Pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung	10	10	10	10	10	10			10	10	80
7	Pembangunan Pos Pengawasan Satwas PSDKP Morowali	10	10	10	10		10			10	10	70
8	Renovasi Pos Pengawasan Satwas SDKP kendari (menjadi renovasi mess pangkalan PSDKP Bitung)											0
9	Renovasi Pos Pengawasan Satwas SDKP Palembangan	10	10	10	10		10			10		60
10	Pembangunan Pos Pengawasan Satwas SDKP Probolinggo	10	10	10	10		10					50
11	Pembanguanan Pos Pengawasan Satwas SDKP Sumbawa	10	10	10	10		10			10		60
12	Pembangunan Pos Pengawasan Satwas PSDKP Sorong	10	10	10			10					40
13	Renovasi Kontruksi Pos Pengawasan Stasiun PSDKP Belawan Tahap II	10	10	10	10		10			10		60
	Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana PSDKP											**62.31**

Nilai 62.31 berasal dari ketersediaan Gambar teknis, RAB, RKSS, TKDN, Shop Drawing, Kurva S, Laporan Mingguan, dan Laporan Bulanan. Nilai Supervisi penyelesaian dibandingkan dengan target terlihat pada tabel berikut:

Tabel 22. Target dan realisasi IKU-13 periode TW III Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	62.31	155,77	-	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian pada TW III 2024 sebesar 62,31 lebih tinggi 155,77% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 40 poin. Pada TW III, IKU ini belum ditargetkan karena masih ada anggaran pembangunan prasarana yang belum tersedia. Capaian pada TW III ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama di Tahun 2023, dikarenakan nilai IKU tersebut diakumulasikan pada akhir tahun. Untuk target Renstra 2020-2024 juga tidak ada.

Keberhasilan dalam mencapai target IKU 13, didukung oleh beberapa strategi sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan UPT selaku pelaksana kegiatan, baik melalui surat, pertemuan, dan supervisi secara langsung di lapangan;
2. Ikut memberi masukan kepada konsultan perencana, kontraktor, dan konsultan pengawas apabila diperlukan; dan
3. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal KKP selama pelaksanaan kegiatan.
4. Melakukan monitoring dan pengendalian Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP secara berkala.

Alokasi anggaran tahun 2024 untuk mendukung tercapainya IKU 13 ini sebesar Rp404.470.000 dan sampai dengan TW III tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp294.416.958 atau 73% dari alokasi anggaran.

14 Persentase penyelesaian rancangan NSPK Bidang pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP

Persentase penyelesaian Rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP adalah perbandingan nilai tahapan penyelesaian Rancangan NSPK dengan jumlah target rancangan NSPK yang diselesaikan. Penyelesaian rancangan NSPK dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan, dan pelaporan. Rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP merupakan seluruh rancangan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dan produk peraturan perundang-undangan

yang disusun lingkup Direktorat POA yang siap ditindaklanjuti untuk proses legal drafting.

Tabel 23. Target dan realisasi IKU 14 periode Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Persentase penyelesaian rancangan NSPK pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Untuk periode TW III tahun 2024 IKU Persentase penyelesaian rancangan NSPK pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP belum ada capaian. Pengukuran direncanakan pada TW IV tahun 2024. Adapun progress penyusunan NSPK dimaksud telah disusun identifikasi substansi dengan menghasilkan beberapa point sebagai berikut:

1. Rancangan Kepdirjen Standar Kapal Pengawas Kelas IV merupakan perubahan nama usulan rancangan Juknis. Semula: Kepdirjen Tentang Standarisasi Desain Kapal Pengawas dan Spesifikasi Teknis.
2. Penyusunan draft Juknis menunggu pengesahan revisi Permen KP 4/2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas, karena ketentuan kapal pengawas kelas IV ini belum muncul di dalam Permen KP 4 2021

Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada Tahun 2023, tidak dapat dibandingkan dikarenakan tahun sebelumnya IKU tersebut diatas ditargetkan pada akhir tahun. Untuk target Renstra 2020-2024 juga tidak ada. Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Tingginya komitmen Direktur POA dalam pemenuhan regulasi di bidang Prasarana dan Sarana. Hal ini karena pimpinan sangat memahami pentingnya/urgensi keberadaan norma, standar, pedoman dan kriteria dalam menjamin operasional sistem pemantauan SDKP berjalan sesuai kaidah dan standar yang tinggi.
2. Penetapan target NSPK yang menjadi prioritas oleh Direktur POA yang harus diselesaikan.

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya IKU 14 ini sebesar Rp500.000.000 dengan realisasi sebesar Rp205,721,400 atau sebesar 41,14%.

15 Inovasi yang dihasilkan Bidang Pemantauan dan Operasi Armada

Indikator ini merupakan inovasi pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung program peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.7/2021, Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Tabel 24. Target dan realisasi IKU-15 periode TW III Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020			CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Inovasi yang dihasilkan Bidang Pemantauan dan Operasi Armada (inovasi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, sampai dengan akhir Triwulan III 2024, belum ada capaian, karena pengukuran dilakukan pada akhir tahun 2024.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam ide/gagasan baru untuk selalu membuat inovasi tahunan agar kinerja menadi lebih baik dari sebelumnya; dan
2. Melakukan rapat internal untuk pelaksanaan pembuatan inovasi perubahan setiap tahunnya.
3. Melakukan tahapan-tahapan penunjang dalam menggali ide/gagasan agar sesuai dengan kebutuhan.

SASARAN KEGIATAN 5

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK LINGKUP DITJEN PSDKP

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA

- Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

- Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (IV) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

- Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Tabel 25. Target dan Realisasi IKU 16 Periode TW III Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	100	100	100%	100	100	100%	-	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian pada TW III Tahun 2024 dicapai dengan maksimal sesuai target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 100 dengan persentase capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada Tahun 2023, capaian relatif sama dengan persentase 100%. Untuk target Renstra 2020-2024 juga tidak ada.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Resiko lingkup Direktorat POA; dan
2. Pemantauan Pengendalian Manajemen Resiko yang menjadi prioritas oleh Direktur POA yang harus diselesaikan.

17 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada

Profesional ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Kualifikasi [Bobot 25%] yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan penilaian sebagai berikut:

- Pendidikan: S3 (Nilai 25); S2 (Nilai 20); S1 (Nilai 15); D3 (Nilai 10); DII/DI/SMA (Nilai 5); SMP/SD (Nilai 1)
- Kompetensi [Bobot 40%] yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), dengan penilaian sebagai berikut:

Pejabat Struktural:

DIKLAT PIM: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) SEMINAR: Pernah ikut (Nilai10), tidak pernah (nilai0)

Pejabat Fungsional Tertentu:
DIKLAT Teknis/Fungsional: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)

Pejabat Fungsional Umum/ Staf:
DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 22,5), tidak pernah (nilai 0)

- ASN Struktural :
  (Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatpim+Diklat20oj+Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)
- ASN Fungsional :
  (Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatfungsional+Diklat20oj+ Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)
- ASN Staff:
  (Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklat20oj+ Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)

Tabel 26. Target dan Realisasi IKU-17 Periode TW III Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian pada periode TW III belum ada realisasi. Karena perhitungan dilakukan secara semester. Adapun tidak ada target akhir Renstra PSDKP 2020-2024.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Direktur POA sangat fokus dalam hal pemenuhan nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat POA;
2. Kesadaran yang tinggi pegawai Dit POA dalam pengembangan diri yang dilakukan secara daring maupun luring; dan
3. Pemenuhan IP ASN yang menjadi prioritas oleh Direktur POA yang harus diselesaikan.

18 Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat POA

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mengamanatkan Instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada masing-masing unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian Pusat/Daerah.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP.

Tabel 27. Target dan realisasi IKU 18 periode TW III Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sampai dengan akhir Triwulan III 2024 IKU ini belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV Tahun 2024.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal capaian nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengendalian Operasi Armada; dan
- Melakukan penilaian mandiri pada Lembar Kerja Evaluasi, dan memenuhi data dukung yang sudah ditetapkan.

19 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan

IKU ini menunjukan Persentase Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat POA berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP. Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK DJPSDKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 28. Target dan realisasi IKU 19 periode TW III Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	60	75,92	126,53	70	70	100	75	100	133,33	80	100	125	80	100	120

Berdasarkan tabel diatas, Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat POA yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” bila dibandingkan dengan Tahun 2023 realisasi capaian sama yaitu 100% atau semua sudah terselesaikan. Hal ini dipengaruhi oleh komitmen pimpinan untuk menyelesaikan penindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan dengan melaksanakan monitoring terhadap tindak lanjut dari rekomendasi yang ada.

Pada Tahun tahun 2024, capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan dengan realisasi 120% dari target. Untuk mencapai keberhasilan IKU ini dipengaruhi oleh adanya perintah direktif pimpinan untuk segera melakukan tindak lanjut setiap rekomendasi yang ada dan senantiasa dilakukan pemantauan secara berkala. Dari capaian tersebut mengindikasikan bahwa Direktorat POA senantiasa memenuhi target dari “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat POA yang Dokumen Tindak

Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan" untuk memastikan tidak terdapat temuan yang harus dilakukan proses berdasarkan laporan perhitungan hasil temuan Inspektorat Jenderal.

20 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

Indikator ini merupakan IKU baru di Tahun 2023, Nilai Implementasi Program Budaya Kerja tingkat Ditjen PSDKP dan dilanjutkan pada tahun 2024 diperoleh dari:

- Rata-rata nilai LKE pelaksanaan Budaya Kerja Seluruh Satker Pusat (5 Satker) dan Satker UPT (14 Satker)
- Nilai LKE yang digunakan adalah nilai tanpa dikonversi ke persentase Target nilai
- Satker Pusat minimal 23 per triwulan
- Target nilai Satker UPT minimal 20,5 per triwulan

Tabel 29. Rincian target dan realisasi IKU-20 periode TW III Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sampai dengan akhir Triwulan II 2024 IKU ini belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV Tahun 2024.

Pada Direktorat Pengendalian Operasi Armada sesudah adanya penerapan program budaya kerja telah terjadi perubahan pola pikir dan cara kerja melalui budaya kerja yang diarahkan untuk menghasilkan inovasi pada setiap area perubahan, karena terdapat lingkungan strategis yang berubah menghasilkan terobosan dalam melakukan kegiatan. Langkah implementasi 11 (sebelas) program budaya kerja pada Direktorat Pengendalian Operasi Armada yang mendukung dalam pencapaian IKU Implementasi Budaya Kerja adalah:

- Hasilkan Inovasi Satker (HIU) : Melakukan asistensi kepada untuk menghasilkan inovasi pada lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada
- Lima Menit Sebelum Jadwal Rapat : Mencantumkan pada surat undangan agar peserta hadir 5 (lima) menit sebelum rapat
- Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5R): Melakukan internalisasi budaya 5R agar ruang kerja lebih rapih
- Upayakan Data Terkini (UPDATE) : Pada saat rapat pimpinan terdapat unit kerja yang menyampaikan paparan dengan menggunakan data pengawasan atau data

penangkapan kapal ilegal yang periode lampau, maka dengan adanya program ini tiap pegawai telah melakukan usaha terkini untuk mendapatkan data yang UPDATE.

- Organisasikan Rapat, Catat, Aksi, dan Arsipkan (ORCA) : Pada saat kegiatan temu teknis aparat penegak hukum terdapat agenda yang belum rapi terjadwal, notulen dan pendokumentasian yang masih berantakan, dengan adanya program ORCA kegiatan menjadi lebih komprehensif melalui pencatatan dan pengarsipan notula.

- Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (TAAT) : Dalam pelaksanaan tugas adanya potensi untuk melakukan korupsi, menerima suap, menerima gratifikasi dan mengambil kebijakan yang bertentangan dengan hukum, maka dengan adanya program TAAT ini telah mewujudkan pegawai yang berintegritas tinggi dalam melaksanakan tugas sehingga menjaga nama baik organisasi dan kepercayaan publik

- Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel, dan Amanah (BARRAKUDA) : Pada saat penyusunan anggaran terdapat kesan dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan tidak sesuai ketentuan, maka dengan adanya program BARRAKUDA ini tiap pegawai telah merencanakan anggaran sesuai kaidah perencanaan dan penganggaran sehingga terjadi peningkatan kualitas DIPA dan meminimalisir temuan auditor.

- ASN PSDKP Produktif Kerja (APIK) : Pada saat jam kerja terdapat pegawai yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak fokus, maka dengan adanya program APIK ini setiap pegawai telah bertanggungjawab dan mempunyai akuntabilitas terhadap pekerjaannya dengan meminimalisir hal-hal yang dapat menganggu fokus kerjanya.

- Menyelesaikan Tugas Dengan Tepat (MANTAP) : Terdapat penyelesaian tugas oleh pegawai atau suatu unit kerja yang terlambat dan tidak tepat waktu, serta mempengaruhi kinerja unit kerja lain, maka dengan adanya program MANTAP ini maka telah tumbuh komitmen kesadaran untuk menghasilkan pekerjaan dengan kualitas tinggi dan diselesaikan secara tepat waktu.

- Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (HARMONIS) : Kurangnya kesadaran dalam memberi penghargaan dan apresiasi mengakibatkan motivasi dan hubungan sesama pegawai menjadi kurang optimal, maka dengan adanya program HARMONIS ini telah mendorong sikap saling menghargai dan apreasiasi terhadap kontribusi kerja pegawai sekecil dan sesederhana apapun dalam pelaksanaan tugas. Terdapat apresiasi Sobat PILAR PSDKP bulanan dan tahunan.

- Gelorakan Gerakan Hemat Energi (Go Green) : Lingkungan kerja terdapat penggunaan energi yang boros, penggunaan kertas kerja yang banyak, pengunaan air minum dalam kemasan, maka dengan adanya porgram Go Green maka tiap pegawai telah timbul kesadaran untuk melakukan efisiensi dalam hal menghemat penggunaan air dan listrik, mematikan peralatan kerja sebelum pulang, dan mengurangi penggunaan kertas dan tinta dalam memproses dokumen kerja.

21 Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat POA

IKU ini digunakan untuk mengukur sejauh mana realisasi anggaran yang telah dilaksanakan oleh Direktorat POA. Realisasi anggaran yang tinggi juga sejalan dengan tingginya capaian output Direktorat Pengendalian Operasi Armada. Dalam rangka mencapai target realisasi anggaran, dilaksanakan aktivitas Pengendalian berupa:

- Memastikan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan sesuai dengan Kaidah;
- Memastikan Penyelesaian Kegiatan Kontraktual sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Memastikan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Akuntabel,
- dan Meminimalisir Deviasi halaman IV DIPA.

Tabel 30. Target dan realisasi IKU 21 periode TW III Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sampai dengan akhir Triwulan II 2024 IKU ini belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV Tahun 2024.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal capaian Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada;
- Melakukan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran; dan
- Membuat rencana penarikan dana serta proyeksi penyerapan.

22 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada

Indikator “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada” merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persentase unit kerja dalam menerapkan aplikasi manajemen pengetahuan.

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

- Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;
- Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV;
- Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf.

Tabel 31. Target dan realisasi IKU 22 periode TW III Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA	-	-	-	86	100	116,28	90	128	142,22	94	133,33	141,84	90	100	111,11

Berdasarkan tabel diatas, capaian periode TW III Tahun 2024 sebesar 133,33% atau 141,84% dari target. Bila dibandingkan dengan TW III Tahun 2023 capaian realisasi terjadi peningkatan yaitu sebesar 5,3%. Keberhasilan IKU ini dipengaruhi oleh keaktifan dan keikutsertaan seluruh pegawai untuk upload dokumen sesuai arahan pimpinan. Adapun realisasi juga telah tercapai berdasarkan target dalam Renstra 2024.

Adapun perbandingan dari nilai capaian IKU tersebut antar Eselon 2 lingkup Ditjen PSDKP ditabulasikan pada tabel berikut:

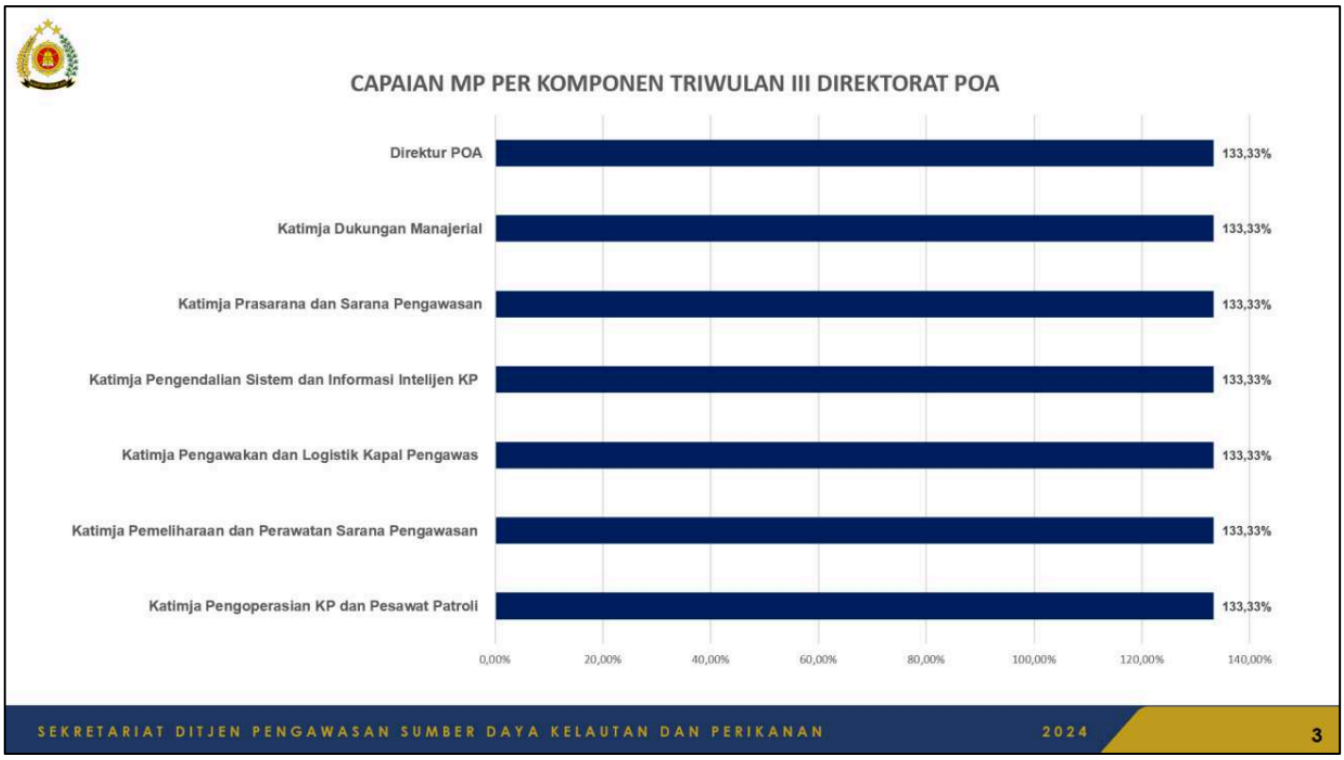

23 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Tahun.

Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Tahun Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023;
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017- 2019;
- Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
- Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Tabel 32. Target dan realisasi IKU 23 periode TW III Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sampai dengan akhir Triwulan III 2024 IKU ini belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV Tahun 2024.

Keberhasilan dalam mencapai target kinerja pada tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- Komitmen pimpinan dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan BMN; dan
- Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin.

24 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Tahun 2023.

Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
- Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE 30%);
- Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%); Kesesuaian tahap
- pelaksanaan (30%).

Tabel 33. Target dan realisasi IKU-24 periode TW III Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sampai dengan akhir Triwulan III 2024 IKU ini belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV Tahun 2024.

Keberhasilan dalam mencapai target IKU pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Komitmen pimpinan untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- Rapat monitoring dan evaluasi rutin setiap bulan; dan
- Penerapan Pantau PBJ berupa reminder dan monitoring PBJ sebagai inovasi pada lingkungan Direktorat Pengendalian Operasi Armada

25 Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat POA

Unit kerja yang berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar komponen penilaian yang meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMENPAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tabel 34. Target dan realisasi IKU-24 periode TW III Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sampai dengan akhir Triwulan III 2024 IKU ini belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV Tahun 2024.

Keberhasilan dalam mencapai target IKU pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Komitmen pimpinan untuk mengawal dan memenuhi persyaratan agar Direktorat POA mencapai predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
- Rapat monitoring dan evaluasi rutin setiap bulan;

26 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi :

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

   Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

   - Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
   - Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

   Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau mewakili nilai guna kesejarahan.

Tabel 35. Target dan realisasi IKU-26 periode TW III Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sampai dengan akhir Triwulan II 2024 IKU ini belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV Tahun 2024.

Keberhasilan dalam mencapai target IKU pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Komitmen pimpinan dalam mengembangkan SDM Arsiparis Dit POA agar terciptanya Arsiparis yang dinamis.

- Rapat monitoring dan evaluasi rutin setiap bulan;

AKUNTABILITAS KEUANGAN

A. Realisasi Anggaran

Di bidang anggaran, Direktorat POA sampai dengan TW III tahun 2024 telah melaksanakan 8 Rincian Output (RO) Kegiatan Pengendalian Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan dalam DIPA Satker Direktorat POA, Ditjen PSDKP tahun 2024. Pagu Direktorat POA sebesar Rp445,134,101,000 (empat ratus empat puluh lima miliar serratus tiga puluh empat juta serratus satu ribu rupiah). Realisasi anggaran Direktorat POA pada TW III Tahun Tahun 2024 sebesar Rp305,899,404,402 (tiga ratus lima miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat ribu empat ratus dua rupiah) atau sebesar 82% dari Pagu anggaran.

Tabel 36. Rekap Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA TW III Tahun 2024

KRO	Rincian Output	Pagu	Realisasi	%
2350.ACA	001 - Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	2,587,650,000	1,540,513,102	69,30%
2350.AFA	001 - NSPK Pemantauan dan Operasi Armada	500,000,000	205,721,400	41,14%
2350.BKB	011 - Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan SDKP yang Dipantau	1,000,000,000	251,069,664	25.11%
2350.BKB	012 - Operasional Pembinaan POKMASWAS yang Dipantau	1,000,000,000	1,247,243,777	80,79%
2350.QHD	001 - Operasi Kapal Pengawas	327,299,298,000	231,448,242,106	79.56%
2350.QHD	002 - Operasi Pesawat Patroli	50,000,000,000	48,772,494,654	98,31%
2350.RAL	001 - Kapal Pengawas	30,000,000,000	-	0.00%
2350.RCG	001 - Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	26,584,803,000	17,343,885,602	77.73%
2350.RDS	001 - Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	6,162,350,000	5,341,303,761	89,89%
TOTAL		445,134,101,000	305,899,404,402	82,00%

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Direktorat Pengendalian Operasi Armada selalu berupaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pada tahun 2024, Direktorat Pengendalian Operasi Armada dinilai cukup efektif dalam menggunakan sumber daya. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian Nilai Kinerja Organisasi sebesar 114,77% (Kriteria: Istimewa), sedangkan anggaran yang digunakan terealisasi sebesar 82%.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengendalian Operasi Armada telah melaksanakan beberapa hal antara lain: (1) memaksimalkan kinerja operasi melalui Pesawat Patroli Udara (*airborne surveillance*) untuk memberikan target operasi terverifikasi. Pola ini dikenal dengan istilah *intercept*. Pola ini memberikan target yang jelas kepada Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan di laut, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak kapal pengawas. (2) melakukan rapat-rapat koordinasi secara virtual sehingga mampu meminimalkan pengeluaran biaya. (3) mengurangi penggunaan kertas dan dokumen tercetak sehingga mampu mengurangi biaya operasional perkantoran.

C. Analisis Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Direktorat Pengendalian Operasi Armada melaksanakan beberapa kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja di tahun 2024 :

- Aspek Operasi Armada
  Berpartisipasi dalam kegiatan operasi bersama baik dalam dan luar negeri seperti Gannet Ausindo, Patkor Optima Malindo, Operasi Interdiksi BNN, Operasi Bersama Bakamla, Operasi Bersama Pengawasan dan Penindakan Penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL), dan lain lain. Selain itu, pola operasi *integrated surveillance system* (ISS) mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi.

- Aspek Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP
  Melakukan koordinasi/pengendalian rutin dengan pihak terkait, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kapal pengawas dengan skema PHLN. Selain itu, senantiasa proaktif dalam menyediakan dokumen pendukung dalam proses bukan blokir anggaran.

- Aspek Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas
  Optimalisasi penggunaan teknologi dalam memenuhi dan melakukan monitoring penggunaan logistik kapal pengawas. Hal tersebut mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan.

- Aspek Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP
  Pada tahun 2024, dilaksanakan akan dilaksanakan penilaian kondisi sarana pengawasan SDKP oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) untuk mengetahui kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan, untuk itu Direktorat POA telah menyiapkan rencana pelaksanaan penilaian. Selain itu, optimalisasi peran Port Engineer (PE) dan melakukan evaluasi kinerjanya. Peran PE diharapkan mampu memberikan deteksi dini terkait kerusakan kapal pengawas dan transfer pengetahuan dalam konteks pemeliharaan kapal pengawas secara tepat untuk meminimalisir kerusakan yang lebih fatal.

- Aspek Sistem dan Informasi Intelijen SDKP
  Pengembangan sistem pemantauan SDKP secara berkesinambungan dan peningkatan pemahaman pengguna aplikasi melalui Bimtek dapat meningkatkan keandalan operasional sistem pemantauan SDKP dalam memberikan data dan informasi.

- POA Virtual Class
  Direktorat Pengendalian Operasi Armada secara berkesinambungan melaksanakan POA Virtual Class berupa inhouse training secara daring maupun luring dalam rangka meningkatkan kapasitas personel serta sharing knowledge untuk meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

BAB IV
Penutup

A. Kesimpulan

1. Nilai capaian kinerja rata-rata Direktorat POA periode TW III Tahun 2024 sebesar 114,77% dengan realisasi anggaran yang digunakan dalam mencapai kinerja tersebut, yaitu sebesar Rp 305,899,404,402 (82%).
2. Jumlah Indikator Kinerja Direktorat POA tahun 2024 adalah sejumlah 26 indikator kinerja. Dari target 26 Indikator Kinerja tersebut, sejumlah 9 Indikator Kinerja tercapai di atas target pada TW III.
3. Pada TW III tahun 2024 terjadi peningkatan nilai kinerja organisasi sebesar 3.91% dibandingkan TW III tahun 2023. Hal tersebut menunjukan efektifitas dan efisiensi Direktorat Pengendalian Operasi Armada dalam mencapai target kinerja yang diberikan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan analisis data yang disajikan pada Laporan Kinerja Direktorat POA TW III tahun 2024, telah berjalan dalam rel yang benar. Hanya saja tentu masih perlu penyempurnaan pada periode Triwulan IV 2024. Beberapa hal yang perlu menjadi rekomendasi dalam rangka pelaksanaan penyusunan kinerja TW IV tahun 2024, yakni sebagai berikut:

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
Memastikan seluruh Indikator Kinerja lingkup Direktorat POA tercapai sesuai target yang ditetapkan khususnya untuk kinerja yang pengukurannya di akhir tahun	Konsisten melakukan evaluasi secara berkala melibatkan penanggungjawab IKU pada level Tim Kerja lingkup Direktorat POA
Memaksimalkan alokasi anggaran pada Operasi Kapal Pengawas karena keterbatasan anggaran dalam memenuhi target Output dikarenakan adanya Blokir Anggaran.	Pengajuan Buka Blokir Automatic Adjusment (AA) kepada Direktorat Jenderal Anggaran.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Pung Nugroho Saksono**

Jabatan : Direktur Pemantauan dan Operasi Armada

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Pung Nugroho Saksono**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Februari 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
Pung Nugroho Saksono	Pung Nugroho Saksono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas (Nilai)	81
2	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat	2	Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP (Indeks)	81
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Indeks)	81
		4	Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek Bidang Pemantauan SDKP (%)	80
3	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	5	Indeks kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	94
		6	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	91
		7	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
		8	Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (Indeks)	79
		9	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Operasi Armada Pengawasan SDKP (%)	100
4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketetuan	10	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	0,5
		11	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (Indeks)	100
		12	Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP (Nilai)	81
		13	Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP (Nilai)	81
		14	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP (%)	100
		15	Inovasi yang dihasilkan Bidang Pemantauan dan Operasi Armada (Inovasi)	1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA	16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA (%)	100
		17	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)	82
		18	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat POA (Nilai)	84
		19	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		20	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	21
		21	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat POA (%)	99,4
		22	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA (%)	94
		23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA (%)	80
		24	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA (%)	80
		25	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat POA (Nilai)	75
		26	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP (Nilai)	70

NO	KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan	**Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan**	**445.134.101.000**
SK 1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	
SK 1.2	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat	
SK 1.3	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	
SK 1.4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketetuan	
SK 1.5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA	
Total Anggaran		**445.134.101.000**

Jakarta, 15 Februari 2024

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksono

Pihak Pertama
Direktur Pemantauan dan Operasi Armada

Pung Nugroho Saksono

Lampiran 2 Rincian Hasil Operasi Pesawat Patroli

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM^2)	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
I	3 - 6 Januari 2024	4	712	11305.6	Operasi Mandiri	Dukungan kegiatan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan berjalan dengan lancar
I-A	12 - 19 Januari 2024	12	716, 717, 572, 571, 715, 714	106296	KP. HIU 12, KP. HIU 01	1. Validasi Kepatuhan Kapal Perikanan >30GT terhadap SPKP. 2. Penerusan informasi keberadaan aktivitas Kapal Ikan Asing di Laut Sulawesi 3. Penerusan informasi aktivitas kapal trawl di perairan Sibolga 4. Pemantauan objek kelautan meliputi 2 KPPN, 4 Pulau-Pulau Kecil Terluar, 7 Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan 1 Objek Lainnya berupa Oil n Gas Field. 5. Update database hasil pemantauan sebagai bahan operasi berikutnya.
II	20 & 29 Februari 2024	2	712	-	Operasi Mandiri	Dukungan kegiatan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan berjalan dengan lancar
II-A	21 Februari – 4 Maret 2024	11	712, 713, 716, 717, 715, 711	153366.4	KP. ORCA 04	1. Validasi Kepatuhan Kapal Perikanan >30GT terhadap SPKP dengan status transmitter aktif. 2. Penerusan informasi keberadaan aktivitas Kapal Ikan Asing di Laut Sulawesi kepada Direktorat POA sebagai bahan operasi kapal pengawas. 3. Pemantauan objek kelautan meliputi P. Karimun Jawa, WP3K Pulau Sepanjang, WP3K Pulau

						BirahBirahan, PPKT P. Mantehage, P. Miangas, P. Marore, TWP Padaido, WP3K P. Ingar, WP3K Banda Neira, WP3K P. Alangtiga, P. Berhala 4. Update database hasil pemantauan sebagai bahan operasi berikutnya.
III	4 Maret 2024	1	712	-	Operasi Mandiri	Dukungan kegiatan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan berjalan dengan lancar
III-A	5 - 23 Maret 2024	13	573, 712, 714, 718, 711	41600	KP. ORCA 05	1. Validasi Kepatuhan Kapal Perikanan >30GT terhadap SPKP yakni 15 Kapal Purse Seine di Sektor Operasi 2. Tidak terdapat Kapal Ikan Asing di Laut Natuna Utara (WPPNRI 711). 3. Tidak terjadi pelanggaran pada hasil pemantauan objek kelautan di area operasi. 4. Telah dilaksanakan dukungan kerja pimipinan dengan lancar. 5. Update database hasil pemantauan sebagai bahan operasi berikutnya.
IV	29 Maret - 17 April 2024	14	712, 571, 714, 718	108.269	KP. ORCA 06, KP. PAUS 01, KP. ORCA 04	1. Validasi Kepatuhan Kapal Perikanan >30GT terhadap SPKP yakni 1 Kapal Gillnet dan 1 Kapal Purse Seine 2. Telah dilaksanakan pengawasan dan pencarian terhadap kapal IUU Fishing KM. Runzheng 03 dan Runzheng 05 kapal berbendera Rusia. 3. Tidak terjadi pelanggaran pada hasil pemantauan objek kelautan

						di area operasi. 4. Telah dilaksanakan dukungan kerja pimipinan dengan lancar. 5. Update database hasil pemantauan sebagai bahan operasi berikutnya.
IV-A	18 - 20 April 2024	3	713	-	-	Dukungan kegiatan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan berjalan dengan lancar
IV-B	19 - 20 April 2024 25 April - 3 Mei 2024	7	718, 572	10763.2	KP. ORCA 06, KP. PAUS 01, KP. ORCA 04	1. Telah dilaksanakan pengawasan dan pencarian terhadap kapal IUU Fishing KM. Runzheng 03 dan Runzheng 05 kapal berbendera Rusia. 2. Tidak terjadi pelanggaran pada hasil pemantauan objek kelautan di area operasi. 3. Telah dilaksanakan dukungan kerja pimipinan dengan lancar. 4. Update database hasil pemantauan sebagai bahan operasi berikutnya.
V	3 Mei 2024	1	712	-	-	Dukungan kegiatan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan berjalan dengan lancar
V-A	6 - 26 Mei 2024	14	573, 718, 712	39763.2	PAUS 01, ORCA 05	1. Validasi Kepatuhan Kapal Perikanan >30GT terhadap SPKP yakni 5 Kapal Purse Seine. 2. Telah dilaksanakan dukungan pengawasan operasi bersama Gannet - 8 Ausindo di Perairan laut Indonesia - Australia. 3. Tidak terjadi pelanggaran pada hasil pemantauan objek kelautan di area operasi. 4. Telah dilaksanakan dukungan kerja pimipinan dengan lancar.

						5. Telah dilakukan pencarian terhadap KM. Run Zheng 03, dan KP. Paus 01 telah melakukan Ad-hock terhadap KIA berbenbera Rusia tersebut.
VB	19 - 22 Mei 2024		712	-	-	Dukungan kegiatan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan berjalan dengan lancar
VI	29 Mei - 5 Juni 2024		718, 716	-	-	Dukungan kegiatan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan berjalan dengan lancar
VI-A	27 Mei - 7 Juni 2024		717, 718, 714, 712, 716	81832	KP. ORCA 04 KP. ORCA 06	1. Validasi Kepatuhan Kapal Perikanan >30 GT terhadap SPKP, 1 Kapal Purse Seine (KM. Senang Hati – 10) dan 1 Kapal Squid Jigging (KM. Perintis Jaya) dengan status aktif. 2. Tidak terjadi pelanggaran pada hasil pemantauan objek kelautan di area operasi. 3. Telah dilaksanakan dukungan kerja pimipinan dengan lancar. 4. Telah dilaksanakan dukungan kegiatan misi SAR dalam pencarian kapal nelayan yang hilang di perairan utara Surabaya 5. Telah dilaksanakan dukungan operasi misi intercept kapal KIA Filipina oleh KP Orca 04 dan KP Orca 06
VII-A	22 Juli - 2 Agustus 2024		711, 712, 713, 716	109.609,6	Operasi Mandiri	1. Penerusan informasi keberadaan aktivitas Kapal Ikan Asing di Laut Natuna dan Laut Sulawesi kepada Direktorat POA sebagai bahan operasi kapal pengawas.

						2. Tidak terjadi pelanggaran pada hasil pemantauan objek kelautan di area operasi. 3. Telah dilaksanakan dukungan kerja pimipinan dengan lancar. 4. Laporan Indikasi Pelanggaran di WPPNRI 716, 711 dan 713 telah disampaikan kepada unit terkait untuk dilakukan tindak lanjut
VIII-A	15 - 19 Agustus 2024	4	573	-	Operasi Mandiri	Dukungan kegiatan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan berjalan dengan lancar
IX	1 – 2 September 2024	2	712	-	Operasi Mandiri	Dukungan kegiatan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan berjalan dengan lancar
IX-A	27 Agustus – 19 September 2024	8	572, 714, 713	23.921,6	Operasi Mandiri	1. Validasi Kepatuhan Kapal Perikanan >30 GT terhadap SPKP. 2. Tidak terjadi pelanggaran pada hasil pemantauan objek kelautan di area operasi. 3. Telah dilaksanakan dukungan kerja pimipinan dengan lancar. 4. Update database hasil pemantauan sebagai bahan operasi berikutnya.
IX-B	12 – 13 September 2024	2	713	-	Operasi Mandiri	Dukungan kegiatan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan berjalan dengan lancar
Total Hari Operasi		**162**	**Total Coverage Area (NM2)**	**820.395**		

Lampiran 3 Daftar kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas

No	Kapal Pengawas	Jenis Target Perawatan		
		Preventif	Prediktif	Darurat
1	KP. Orca 01	Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan April 2024	Pengadaan Suku Cadang Mesin Induk MTU	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Penggantian AVR Leroy Somer R450 Generator AE Kiri
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Mei 2024	Pengadaan Suku Cadang Insert Element Pre Fuel Filter	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Perbaikan Crane Kanan
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Juni 2024	Pengadaan Suku Cadang Gear Box	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Perbaikan Mesin Bantu Kiri
			Pengiriman suku cadang mesin tempel Yamaha di RIB	
			Pengiriman suku cadang mesin bantu CATERPILLAR C4.4, suku cadang Gear Box ZF 9300, suku cadang BP-Filters, dan suku cadang mesin induk MTU 16V4000M73	
2	KP. Orca 02	Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan April 2024	Pengadaan Suku Cadang Mesin Induk MTU	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Perbaikan RIB Kanan
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Mei 2024	Pengadaan Suku Cadang Insert Element Pre Fuel Filter	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Perbaikan RIB Kiri
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Juni 2024	Pengadaan Suku Cadang Gear Box	
3	KP. Orca 03	Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan April 2024	Pengadaan Suku Cadang Mesin Induk MTU	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Penggantian ACCU Battery
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Mei 2024	Pengadaan Suku Cadang Insert Element Pre Fuel Filter	
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Juni 2024	Pengadaan Suku Cadang Gear Box	
			Pengiriman suku cadang mesin bantu Caterpillar C9 dan C4.4, suku cadang mesin bantu Volvo, dan suku cadang mesin induk MAN	

			Pengadaan perlengkapan Kapal Pengawas 60 meter dalam rangka pembelian AC Panasonic 2 PK dan 1 PK	
4	KP. Orca 04	Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan April 2024	Pengadaan Suku Cadang Mesin Induk MTU	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Instalasi Sistem Gas Buang Mesin Induk Kanan
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Mei 2024	Pengadaan Suku Cadang Insert Element Pre Fuel Filter	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Penggantian MCB dan CBC
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Juni 2024	Pengadaan Suku Cadang Gear Box	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Perbaikan As Hydrolik
		Pembuatan Repair List Docking KP. Orca 04	Pengiriman suku cadang mesin bantu Caterpillar C9	
		Servis Perlengkapan Keselamatan Liferaft Kapal Pengawas	Pengiriman suku cadang mesin bantu CATERPILLAR C4.4, suku cadang Gear Box ZF 9300, suku cadang BP-Filters, dan suku cadang mesin induk MTU 16V4000M73	
		Servis Perlengkapan Pemadam Kebakaran (PMK) Kapal Pengawas		
5	KP. Orca 05	Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan April 2024	Pengadaan Suku Cadang Insert Element Pre Fuel Filter	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Pengadaan Freon Kapal Pengawas
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Mei 2024	Pengadaan Suku Cadang Gear Box	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Pembuatan Dampra Sponge Karet
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Juni 2024	Pengadaan perlengkapan Kapal Pengawas 60 meter dalam rangka pengadaan GoPro 12 dan Icom VHF Marine	
6	KP. Orca 06	Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan April 2024	Pengadaan Suku Cadang Insert Element Pre Fuel Filter	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Pembuatan Dampra Sponge Karet
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Mei 2024	Pengadaan Suku Cadang Gear Box	

		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Juni 2024	Pengadaan perlengkapan Kapal Pengawas 60 meter dalam rangka pengadaan GoPro 12 dan Icom VHF Marine	
7	KP. Barakuda 01	Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan April 2024	Pengadaan Suku Cadang Mesin Bantu Volvo	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 50 Meter Dalam Rangka Pembuatan Dampra Sponge Karet
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Mei 2024	Pengadaan Suku Cadang Mesin Induk MAN	
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Juni 2024	Pengadaan Suku Cadang Insert Element Pre Fuel Filter	
			Pengadaan Suku Cadang Gear Box	
			Pengiriman suku cadang mesin bantu Caterpillar C9 dan C4.4, suku cadang mesin bantu Volvo, dan suku cadang mesin induk MAN	
			Pengiriman suku cadang mesin induk CATERPILLAR 3516 B, mesin bantu PERKINS 1006 TG 2 AM, suku cadang BP-Filters dan suku cadang perpompaan	
			Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas 50 Meter Dalam Rangka Pembelian HT ICOM M-37 Marine	
			Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas 50 Meter Dalam Rangka Pembelian Polytron Showcase SCN 230L & 180L	
8	KP. Barakuda 02	Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan April 2024	Pengadaan Suku Cadang Mesin Bantu Volvo	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 50 Meter Dalam Rangka Pembuatan Dampra Sponge Karet
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Mei 2024	Pengadaan Suku Cadang Mesin Induk MAN	
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Juni 2024	Pengadaan Suku Cadang Insert Element Pre Fuel Filter	
			Pengadaan Suku Cadang Gear Box	
			Pengiriman suku cadang mesin bantu Volvo dan suku cadang sistem perpompaan	

			Pengiriman suku cadang mesin bantu Volvo	
			Pengiriman suku cadang mesin bantu Caterpillar C9 dan C4.4, suku cadang mesin bantu Volvo, dan suku cadang mesin induk MAN	
			Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas 50 Meter Dalam Rangka Pembelian HT ICOM M-37 Marine	
			Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas 50 Meter Dalam Rangka Pembelian Chest Freezer GEA Qb 1200 dan Polytron Showcase SCN 237	
9	KP. Hiu Macan Tutul 01	Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan April 2024	Pengadaan Suku Cadang Mesin Induk Cummins	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 42 Meter Dalam Rangka Pengadaan Suku Cadang Generator
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Mei 2024	Pengadaan Suku Cadang Insert Element Pre Fuel Filter	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 42 Meter Dalam Rangka Perbaikan Dinamo Blower
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Juni 2024	Pengadaan Suku Cadang Gear Box	
		Servis Perlengkapan Keselamatan Liferaft Kapal Pengawas	Pengiriman suku cadang mesin bantu CUMMINS 6BT5.9-DM, suku cadang mesin bantu CATERPILLAR C4.4, dan suku cadang BP-Filters	
		Servis Perlengkapan Pemadam Kebakaran (PMK) Kapal Pengawas		
		Servis Gyro Compass		
10	KP. Hiu Macan Tutul 02	Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan April 2024	Pengadaan Suku Cadang Mesin Induk Caterpillar	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 42 Meter Dalam Rangka Cleaning Dynamo Mesin Bantu
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Mei 2024	Pengadaan Suku Cadang Mesin Bantu Cummins	
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Juni 2024	Pengadaan Suku Cadang Insert Element Pre Fuel Filter	

		Servis Perlengkapan Keselamatan Dalam Rangka Penggantian New Supply Liferaft Kapasitas 20 Person	Pengadaan Suku Cadang Gear Box	
			Pengiriman suku cadang mesin bantu CUMMINS 6BT5.9-DM	
			Pengiriman suku cadang mesin induk CATERPILLAR 3516 B, mesin bantu PERKINS 1006 TG 2 AM, suku cadang BP-Filters dan suku cadang perpompaan	
11	KP. Paus 01	Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan April 2024	Pengadaan Suku Cadang Mesin Induk Guascor	
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Mei 2024	Pengadaan Suku Cadang Mesin Bantu Baudouin	
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Juni 2024	Pengadaan Suku Cadang Insert Element Pre Fuel Filter	
		Pembuatan Repair List Docking KP. Paus 01	Pengadaan Suku Cadang Gear Box	
		Servis Perlengkapan Keselamatan dan Pemadam Kebakaran Kapal Pengawas	Pengiriman suku cadang mesin bantu Baudouin dan suku cadang penyaring bahan bakar BP Filter	
12	KP. Akar Bahar 01	Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan April 2024	Pengadaan Suku Cadang Mesin Induk Yanmar	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 14 Meter Dalam Rangka Penggantian Marine Air Conditioner
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Mei 2024	Pengadaan Suku Cadang Insert Element Pre Fuel Filter	
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Juni 2024		